BAB IV

HASIL PENELITIAN

4.1. Deskripsi Lokasi Penelitian

4.1.1. Majelis Permusyawaratan Rakyat – RI

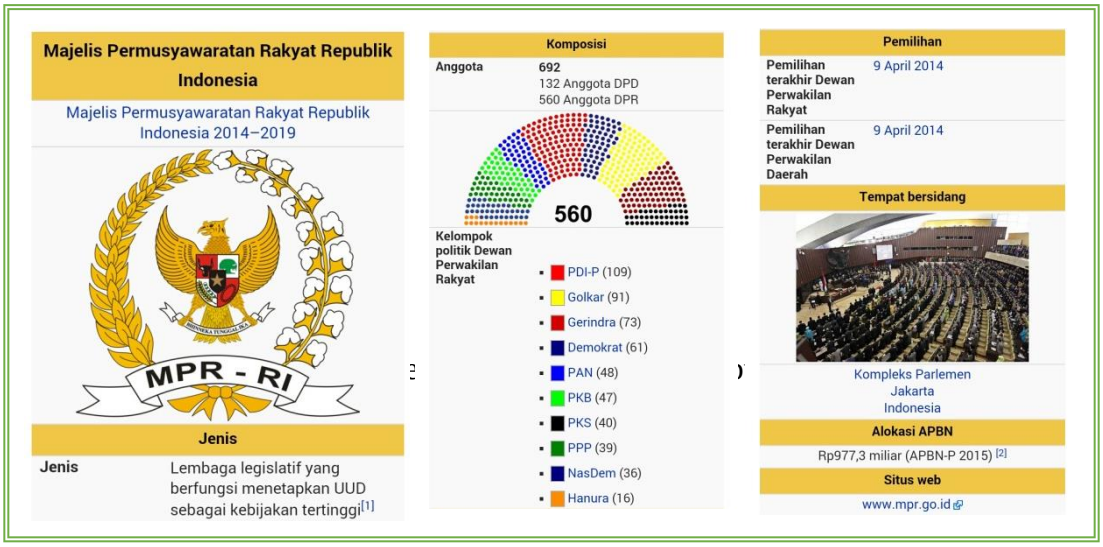

Gambar 2. Profil Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.

Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, MPR RI merupakan lembaga legislatif bikameral, terdiri dari 10 fraksi DPR RI dan DPD. MPR RI mempunyai tugas dan wewenang dalam mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Melantik Presiden dan Wakil Presiden RI hasil pemilihan umum, Memutuskan usul DPR RI untuk memberhentikan Presiden dan/Wakil dalam masa jabatannya, Melantik Wakil Presiden jadi Presiden, Memilih Wakil Presiden.

Majelis Permusyawaran Rakyat atau yang biasa disingkat MPR RI adalah lembaga yang beranggotakan 560 Anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR RI yang terdiri dari fraksi yang terbesar adalah PDIP dengan 109 anggota, Golongan Karya 91 anggota, Gerindra 73 anggota, Demokrat 61 anggota, PAN 48 anggota, PKB 47 anggota, PKS 40 anggota, PPP 39 anggota, Nasdem 36 anggota dan Hanura 16 anggota. Keanggotaan MPR yang berasal dari Dewan Perwakilan Daerah atau DPD berjumlah 132 orang. keanggotaan dewan periode kerja 2014-2019 adalah berdasarkan pemilihan umum legislatif yang diselenggarakan pada 9 April 2014.

Majelis Permusyawaran Rakyat sesuai dengan tugas yang diamanatkan oleh Pasal 5 huruf a dan huruf b, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 jo. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD telah merancang dan melaksanakan agenda pemantapan nilai-nilai dan norma kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara melalui sosialisasi Empat Pilar MPR-RI Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai konstitusi negara serta Ketetapan MPR, Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai bentuk negara, dan *Bhinneka Tunggal Ika* sebagai semboyan negara.[1]

Dalam melaksanakan tugas sosialisasi, MPR membentuk Badan Sosialisasi yang keanggotaannya berjumlah 45 orang, terdiri atas unsur fraksi-fraksi Partai Politik dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Tugas Badan Sosialisasi berdasarkan Peraturan MPR Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib MPR adalah memasyarakatkan Ketetapan MPR; memasyarakatkan Pancasila, Undang-Undang

[1] Pimpinan MPR dan Tim Kerja Sosialisasi MPR RI Periode 2009-20014, *Loc.Cit,* hlm xxii.

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan *Bhinneka Tunggal Ika*.[2]

Badan Sosialisasi bertugas untuk menyusun materi dan metodologi serta memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan pemasyarakatan secara komprehensif (menyeluruh) dan melaporkan hasil-hasil pelaksanaaan tugasnya tersebut kepada Pimpinan MPR. Dalam melaksanakan tugasnya Badan Sosialisasi MPR RI di koordinasikan dengan Biro Persidangan dan Sosialisasi Sekretariat Jenderal MPR RI yang diatur dalam Pasal 5 Peraturan Sekretaris Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang organisasi dan tata kerja Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia yang menyatakan bahwa : Biro Persidangan dan Sosialisasi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan administrasi kegiatan sidang Paripurna MPR, rapat Panitia Ad Hoc dan Alat Kelengkapan, Badan-badan dan Lembaga Pengkajian, penyusunan rencana program dan evaluasi pelaksanaan sosialisasi MPR Badan Sosialisasi dan pelaksanaan kegiatan rapat dan administrasi kesekretariatan Fraksi dan Kelompok Anggota serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh Sekretaris Jenderal MPR RI.[3]

Dalam Pasal 7 Peraturan Sekretaris Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang organisasi dan tata kerja Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia yang menyatakan bahwa : Biro Persidangan dan Sosialisasi terdiri atas :[4]

---

[2] *Ibid.*

[3] Sekertariat Jenderal MPR RI, *Peraturan Sekretaris Jenderal MPR RI Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal MPR RI,* (Jakarta: Sekjen MPR RI, 2015) hlm 2-3.

[4] *Ibid,* hlm 4.

a. Bagian Persidangan dan Risalah;
b. Bagian Sekretariat Badan Sosialisasi; dan
c. Bagian Sekretariat Fraksi dan Kelompok Anggota.

Berdasarkan Pasal 12 Peraturan Sekretaris Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang organisasi dan tata kerja Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia bahwa; Bagian Sekretariat Badan Sosialisasi mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana program, bahan materi dan metodologi sosialisasi MPR serta bahan evaluasi penyelenggaraan kegiatan sosialisasi MPR, pemberian dukungan kegiatan sosialisasi MPR dan penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas Badan Sosialisasi serta tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh Kepala Biro Persidangan dan Sosialisasi.[5]

Bagian Sekretariat Badan Sosialisasi melakukan fungsi, sesuai Pasal 13 Peraturan Sekretaris Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang organisasi dan tata kerja Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia yaitu :[6]

a. Penyusunan rencana program, bahan materi dan metodologi sosialisasi MPR serta bahan evaluasi penyelenggaraan kegiatan sosialisasi MPR;
b. Pemberian dukungan kegiatan sosialisasi MPR dan penyusunan laporan hasil-hasil pelaksanaan tugas Badan Sosialisasi; dan

[5] *Ibid*, hlm 5.
[6] *Ibid*, hlm 6.

c. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh Kepala Biro Persidangan dan Sosialisasi.

Berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang organisasi dan tata kerja Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.[7]

Susunan Organisasi Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat RI :

1) Sekretaris Jenderal : Ma'ruf Cahyono, S.H., M.H.
2) Wakil Sekretaris Jenderal : Dra. Selfi Zaeni

Kepala Biro / Pusat Sekretariat Jenderal MPR RI

3) Ka. Biro Persidangan dan Sosialisasi : Muhammad Rizal, S.H., M.Si.
4) Ka. Biro Sekretariat Pimpinan : Drs. Tugiana
5) Ka. Biro Hubungan Masyarakat : Ma'ruf Cahyono, S.H., M.H.
6) Ka. Biro Administrasi Pengawasan : Drs. Aip Suherman
7) Ka. Biro Keuangan : Suryani S.H.
8) Ka. Biro Umum : Siti Fauziah S.E.
9) Ka. Biro Pengkajian : Drs. Yana Indrawan, M.Si.

[7] *Ibid.*

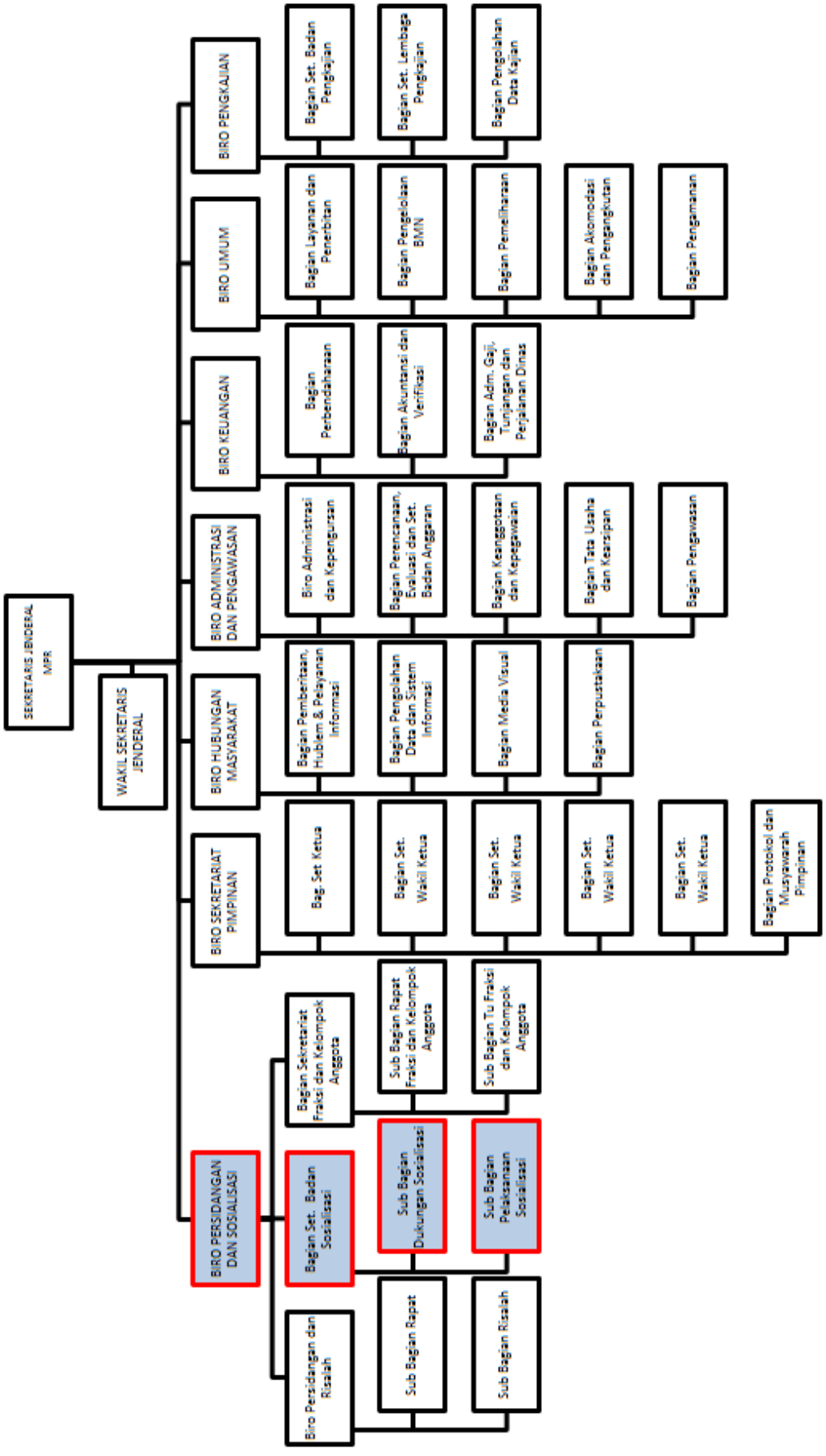

Gambar 3. Struktur Kepengurusan Sekretariat Jenderal MPR RI.

4.1.2. Letak Lokasi Badan Sosialisasi MPR RI

Gambar 4. Denah Lokasi Penelitian Kompleks MPR, DPR DPD RI.

Badan Sosialisasi Majelis Permusyawaratan Raykyat Republik Indonesia terletak di Kompleks MPR, DPR dan DPD RI. Jalan Gatot Subroto nomor 6, Jakarta Pusat Provinsi DKI Jakarta. Badan Sosialisasi MPR terletak di lantai 7 Gedung Sekretariat Jenderal MPR RI yang dikenal dengan Gedung Nusantara III. Ruangan Biro Persidangan dan Sosialisasi berada di ujung kanan lantai 7 Nusantara III.

Untuk mencapai lokasi penelitian cukup mudah karena berada di jantung ibu kota DKI Jakarta. Apabila menggunakan sarana transportasi kereta *Commuter Line* tujuan stasiun Pal Merah dapat langsung menyebrang untuk memasuki pintu belakang kompleks MPR, DPR dan DPD RI. Atau apabila menggunakan bus *Trans Jakarta* atau moda Bus APTB (Angkutan Perbatasan Terintegrasi Busway) dapat turun di halte Senayan JCC (Jakarta *Convention Center*). Namun apabila menggunakan transportasi busway, harus menempuh jarak yang jauh untuk bisa

menemukan pintu masuk tamu di kompleks MPR, DPR dan DPD RI. yang letaknya dibelakang kompleks tersebut.

Gambar 5. Kondisi Lantai 7-Sekretariat Badan Sosialisasi MPR-RI

Di lantai 7 Gedung Nusantara III kompleks MPR, DPR dan DPD terdapat beberapa ruangan kesekretariatan MPR yang difungsikan sebagai ruang kerja Bagian Pimpinan Sekretariat Jenderal MPR dan Bagian Persidangan dan Sosialisasi, lebih rinci pada lantai 7 gedung Nusantara III terdiri dari ruangan:

1. Ruang Rapat
2. Ruang DikLat (Pendidikan dan Latihan)
3. Ruang Rapat Wakil Sekretaris Jenderal MPR RI
4. Ruang Staff Wakil Sekretaris Jenderal
5. Ruang Kerja Wakil Sekretaris Jenderal
6. Ruang Istirahat
7. Ruang Kepala Biro Sekretariat Pimpinan
8. Ruang Bagian Sekretariat Pimpinan

9. Lobby dan Bagian Pamdal lantai 7 Nusantara III
10. Ruang Function Room
11. Ruang Staff Sekretariat Jenderal
12. Ruang Rapat
13. Ruang Kepala Biro Persidangan dan Sosialisasi
14. Ruang Kerja Sekretaris Jenderal MPR RI
15. Ruang Biro Persidangan dan Sosialisasi
16. Ruang Istirahat
17. Toilet Pria dan Wanita

4.2. Sumber Informasi

Sumber informasi dalam penelitian ini dikategorikan menjadi dua yaitu informan dan *key* informan. *Key* Informan disini adalah para pihak yang terlibat langsung dalam perencanaan, pelaksanaan hingga pelaporan kegiatan-kegiatan Sosialisasi Empat Pilar MPR RI. 3 orang Key Informan berasal dari pihak Pimpinan Badan Sosialisasi MPR RI, Kepala Biro Persidangan dan Sosialisasi dan anggota Bagian Sekretariat Sosialisasi. Lalu Informan berasal dari audiens/peserta/partisipan kegiatan sosialisasi sebanyak 8 orang informan yang dipilih melalui latar belakang pendidik dan penggiat organisasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn).

Tabel 1. **Daftar Nama Informan Penelitian**

No	Nama Informan	Pekerjaan	Organisasi
1	Dr. Achmad Husen, M.Pd.	Dosen FIS-UNJ	AP3KnI DKI Jakarta
2	Mohamad Sodeli, M.Pd	Guru SMAN 44 Jakarta	MGMP PPKn SMA DKI Jakarta
3	Aditiya Fajarsyah	Guru SMAN 21 Jakarta	MGMP PPKn SMA DKI Jakarta
4	Wahyu Akbari	Mahasiswa S1 PPKN	HIMNAS PPKN
5	Yuyus Kardiman, M.Pd.	Dosen FIS-UNJ	AP3KnI
6	Eni Sanasih R, S.Pd.	Guru SMPN 47 Jakarta	MGMP PPKn SMP DKI JAKARTA
7	Irwan Sajali, S.Pd.	Guru SMKN 7 Jakarta	MGMP PPKn SMK DKI JAKARTA
8	Muhammad Fauzi, S.Pd.	Guru SMAN 2 Riau	HIMA PPKN UNIVERSITAS RIAU

Tabel 2. **Daftar Nama *Key* Informan Penelitian**

No	Nama *Key* Informan	Pekerjaan
1	Drs. H. Ahmad Basarah, M.H	Ketua Badan Sosialisasi MPR
2	Muhammad Rizal, SH., M.Si.	Kepala Biro Persidangan dan Sosialisasi MPR RI
3	Endang Sapari, S.IP.	Kepala Sub. Dukungan Pelaksanaan Sosialisasi

Penelitian didahului observasi dengan cara mengamati beberapa kali kegiatan rutin Sekretariat Badan Sosialisasi MPR RI dan ikut turut serta sebagai peserta dalam kegiatan sosialisasi Empat Pilar MPR RI. Kemudian dilanjutkan berdiskusi dengan staff Biro Sosialisasi MPR RI dan menggali informasi dari staff Sekretariat Badan Sosialisasi MPR. dari diskusi itu didapatkan data awal untuk melakukan wawancara dengan *key* informan.

4.3. Hasil Temuan

4.3.1. Pancasila dalam Sosialisasi Empat Pilar MPR RI

Majelis Permusyawaran Rakyat sesuai dengan tugas yang diamanatkan oleh Pasal 5 huruf a dan huruf b, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 jo. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD telah merancang dan melaksanakan agenda pemantapan nilai-nilai dan norma kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara melalui sosialisasi Empat Pilar MPR-RI, Materi sosialisasi terdiri dari Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai konstitusi negara serta Ketetapan MPR, Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai bentuk negara, dan *Bhinneka Tunggal Ika* sebagai semboyan negara.[8]

Pancasila sebagai Ideologi dan dasar negara, tercantum dalam konstitusi negara meskipun beberapa kali mengalami pergantian dan perubahan konstitusi. Ini menunjukkan bahwa Pancasila merupakan konsensus nasional dan dapat diterima oleh semua kelompok masyarakat Indonesia. Pancasila terbukti mampu memberi kekuatan kepada bangsa Indonesia, sehingga perlu dimaknai, direnungkan, dan diingat oleh seluruh komponen bangsa.[9]

Dimuatnya Pancasila dalam sosialisasi Empat Pilar MPR RI masih menjadi kontroversi tersendiri, tidak terkecuali dari kalangan Akademisi PPKN yang menilai tidak tepat memposisikan Pancasila hanya sebagai Pilar, karena sejak awal sejarahnya dalam sidang BPUPKI Pancasila di rancang saat perumusan dasar

[8] Pimpinan MPR dan Tim Kerja Sosialisasi MPR RI Periode 2009-20014, *Loc.Cit,* hlm xxii.
[9] *Ibid,* hlm. 7.

negara yang diproyeksikan sebagai dasar Negara Indonesia, Hampir seluruh informan memberikan respon ketidaksepemahaman atas penyebutan Pancasila sebagai Pilar MPR RI, salah satunya berasal dari Bapak Aditiya Fajarsyah, yang mengemukakan bahwa :

> "Sebelumnya kan sudah banyak yang protes dengan adanya sosialisasi Empat Pilar, karena sebutan dan peletakan Pancasila dalam Empat Pilarnya. Sampai sekarang banyak orang beranggapan Pancasila itu bagian dari empat pilar itu, sudah terlanjur. jadi banyak yang berpikiran seperti itu. Sebetulnya kita dari pihak MGMP sudah melakukan forum diskusi dengan lembaga terkait dan menyampaikan Pancasila tidak pantas sebagai pilar, dan sekarang sudah sampai ke MK bahwa harus ada koreksi untuk itu. Waktu ditanyakan kepada MPR jawaban dari mereka hanya penamaan saja".[10]

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah konstitusi negara sebagai landasan konstitusional bangsa Indonesia yang menjadi hukum dasar bagi setiap peraturan perundang-undangan di bawahnya. Oleh karena itu, dalam negara yang menganut paham konstitusional tidak ada satu pun perilaku penyelenggara negara dan masyarakat yang tidak berlandaskan konstitusi.[11]

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan bentuk negara yang dipilih sebagai komitmen bersama. Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah pilihan yang tepat untuk mewadahi kemajemukan bangsa. Oleh karena itu komitmen kebangsaan akan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi suatu "keniscayaan" yang harus dipahami oleh seluruh komponen bangsa.[12]

Bhinneka Tuggal Ika adalah semboyan negara sebagai modal untuk bersatu. Kemajemukan bangsa merupakan kekayaan kita, kekuatan kita, yang sekaligus menjadi tantangan bagi kita bangsa Indonesia, baik kini maupun yang akan datang.

---

[10] Hasil Wawancara dengan Informan, Aditiya Fajarsyah, S.Pd., 10 Maret 2016 di SMAN 21 Jakarta.
[11] Pimpinan MPR dan Tim Kerja Sosialisasi MPR RI Periode 2009-20014, *Op.Cit.*, hlm 7.
[12] *Ibid.*

Oleh karena itu kemajemukan harus kita hargai, kita junjung tinggi, kita terima dan kita hormati serta kita wujudkan dalam semboyan *Bhineka Tunggal Ika.*[13] Secara keseluruhan materi Empat Pilar MPR RI, sudah terinternalisasikan ke beberapa lapisan masyarakat melalui Sosialisasi Empat Pilar MPR RI yang sebelumya bernama Empat Pilar Kehidupan Bernegara, Secara keseluruhan sebagai Empat Pilar MPR RI, Bapak Iwan Sajali memberikan pandangan bahwa :

> "Tertarik, karena dilihat dari kronologis penamaan empat pilar itu. karena ketidaksepakatan itu yang membuat saya tertarik. artinya kan empat pilar itu kan sejajar, pilar itukan tiang atau tonggak kebangsaan yang pertama Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, NKRI dan *Bhinneka Tunggal Ika.* kalau dikonsepkan empat pilar begitu tidak tepat. Pancasila itu bukan pilar dalam konteks PPKn. Pancasila adalah sebagai dasar, bukan pilar letak yang tepat adalah fondasi, bukan pilar bukan yang menopang. terus yang kedua adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia bukan pilar juga tetapi pagar. siapapun yang memasuki wilayah Indonesia harus melewati pagar tersebut sebagai perwujudan konstitusi Indonesia. NKRI itu juga bukan pilar itu adalah rumah, dimana NKRI itu adalah wadahnya bangsa Indonesia. terakhir *bhinneka tunggal ika* itulah isi dari Indonesia adalah keragaman, multikultural dan itu melebihi dari pilar itu. itulah mengapa saya tidak setuju dengan pilar karena suatu saat akan jatuh".[14]

MPR RI memberikan tanggapan, bahwa pemberian atau masalah nama hanyalah taraf formalitas, dalam taraf subtansialnya Pancasila mendapatkan penegasan sebagai ideologi dan dasar negara, saat ini urgensitas untuk menggiatkan Pancasila dan nilai-nilai kebangsaan jauh lebih penting, hal ini diungkapkan oleh Ketua Badan Sosialisasi MPR RI bahwa :

> "Dalam konteks nama program sosialisasi, dulu Pak Taufiq Kiemas menyebut nama kegiatan sosialisasi dengan Sosialisasi Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara. Tidak ada yang salah dari penggunaan nama itu. Pimpinan MPR telah bertanya dan berkonsultasi dengan Pusat Pengembangan Bahasa Indonesia. Kepala Pusat Pengembangan Bahasa Indonesia pada waktu itu mengatakan istilah Empat Pilar dapat dibenarkan, karena istilah "pilar" juga mengandung pengertian sesuatu yang pokok atau sesuatu yang induk. Jadi bukan hanya dalam pengertian awam bahwa pilar itu adalah tiang-tiang yang sejajar sehingga kemudian tafsirnya seolah-olah

[13] *Ibid*, hlm. 8.
[14] Hasil Wawancara dengan Informan, Iwan Sajali, S.Pd., 24 Maret 2016 di SMKN 7 Jakarta.

> nilai-nilai Pancasila itu sejajar dengan nilai-nilai lainnya. Penyebutan pilar bukan untuk menyamakan posisi Pancasila dengan nilai-nilai berbangsa dan bernegara lainnya, tetapi Pancasila tetap difungsikan sebagai dasar atau ideologi negara. Namun, Badan Sosialisasi maupun Pimpinan MPR menghormati putusan MK. Karena itu, Badan Sosialisasi nanti akan merumuskan sebuah terminologi baru dimana kita tetap menghargai keputusan MK, tetapi kita juga mempertimbangkan aspek komunikasi politik MPR dalam melaksanakan kegiatan sosialisasi ini karena istilah Empat Pilar sudah memiliki posisi tersendiri di masyarakat atau sudah punya *branding*. Ini bukan perkara mudah untuk membuat *branding* baru. Kita akan mencari satu formula nama program ini agar tidak menimbulkan perdebatan yang tidak perlu di tengah masyarakat".[15]

Empat pilar dari konsepsi kenegaraan Indonesia tersebut merupakan prasyarat minimal, di samping pilar-pilar lain, bagi bangsa ini untuk bisa berdiri kukuh dan meraih kemajuan berlandaskan karakter kepribadian bangsa Indonesia sendiri. Setiap penyelenggara negara dan segenap warga negara Indonesia harus memiliki keyakinan, bahwa itulah prinsip-prinsip moral keindonesian yang memandu tercapainya perikehidupan bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.[16]

4.3.2. Kualifikasi dan Integritas Sosialisator Pancasila

Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai lembaga legislatif dua kamar berdasarkan pemilihan terakhir pada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI) apabila dijumlahkan MPR RI beranggotakan sebanyak 692 dewan yang terdiri dari 560 anggota DPR RI dan 132 anggota DPD RI. DPR RI diwarnai adanya 10 fraksi yang terdiri dari 10 Partai Politik yang lolos *Parlementairy Treshold* yaitu; PDI-P 109 anggota, Golkar 91 anggota, Gerindra 73 anggota, Demokrat 61 anggota, PAN 48 anggota, PKB 47 Anggota, PKS 40

[15] Hasil Wawancara dengan *Key Informan,* Drs. H. Ahmad Basarah, M.H., 27 April 2016.
[16] *Ibid.*

anggota, PPP 39 anggota, Nasional Demokrat 36 anggota dan Hanura 16 anggota.

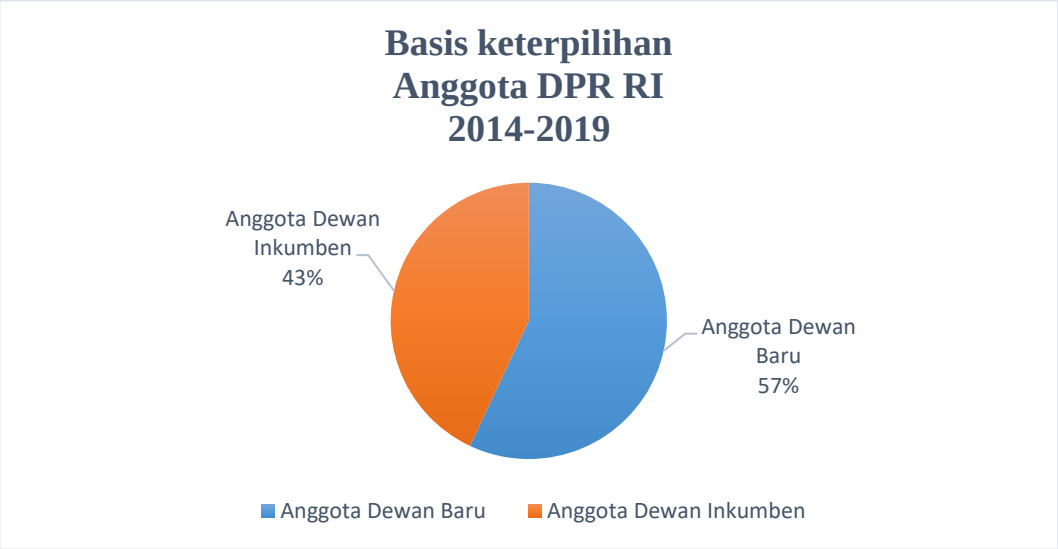

Grafik 1. Basis Keterpilihan Anggota DPR 2014-2019[17]

Hasil pemilihan umum legislatif pada 9 April 2014 untuk periode kerja 2014-2019 menunjukan bahwa MPR RI akan memiliki banyak anggota dewan baru sekitar 57 % anggota DPR RI adalah anggota dewan baru dan hanya sekitar 43 % adalah anggota inkumben, Partai dengan presentase anggota baru tertinggi adalah Partai Nasional Demokrat sekitar (97%) dan Gerindra (84%).[18] data ini menunjukan pentingnya memberikan pendampingan atau pembinaan ulang terhadap anggota DPR baru yang akan melaksanakan amanah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD bahwa anggota MPR berkewajiban memasyarakatkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, NKRI dan *Bhinneka Tunggal Ika.*

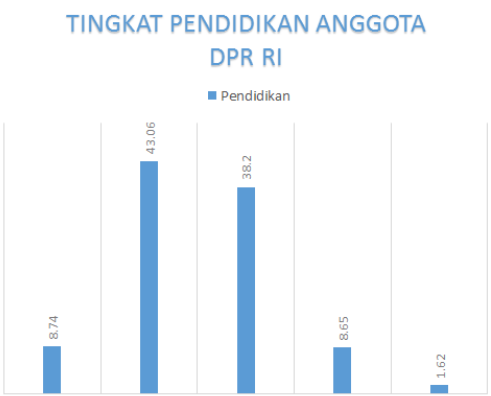

Grafik 2. Latar Belakang Pendidikan Anggota DPR-DPD RI Periode 2014-2019[19]

Apabila ditinjau dari segi pendidikan MPR RI terdiri dari Anggota DPR RI yang sebagian besar adalah sarjana strata satu sebesar 43.06%, master atau magister sebesar 38.20%, kemudian Doktor sebanyak 8.65%. namun masih ada Anggota DPR RI yang berlatar pendidikan Dipoloma atau D3 1.62% dan lulusan Sekolah Menengah Atas/SMA sebanyak 8.74%. Tidak berbeda jauh dengan DPR RI tinjauan terhadapa anggota DPD RI terdiri dari mayoritar berpendidikan S1. Dari tingkatan yang terendah yakni berpendidikan Sekolah Menengah Atas/SMA sebanyak 15%, Diploma 2%, Sarjana atau strata satu sebesar 39%, magister S2 34% dan Doktor sebesar 10%.

Latar belakang pendidikan anggota MPR sangat penting dan mempengaruhi kualitas penyampaian dan pelaksanaan kesulurahan sosialisasi empat pilar MPR, Seperti yang diungkapkan oleh informan Bapak Yuyus Kardiman bahwa :

> "Kompetensi dan latar belakang pendidikan dari anggota MPR mensosialisasikan empat pilar MPR, itulah yang saya khawatirkan, disaat MPR mensosialisasikan empat pilar MPR, apakah anggotanya mengetahui

[19] *Ibid*., hlm 16

> makna terdalam dari yang disosialisasikannya Pancasila, Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945, NKRI, *Bhinneka Tunggal Ika".*[20]

Dapat dipastikan bahwa seluruh anggota MPR RI pernah menerima materi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dari jenjang pendidikan dasar hingga menengah, namun tidak ada satupun anggota MPR yang memiliki *basic* pendidikan tinggi Ilmu Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, sehingga pemahaman yang dimiliki tidak sekomprehensif dan holistik, serupa dengan Bapak Yuyus Kardiman, terdapat tiga informan yang mempertanyakan kompetensi anggota MPR dalam menyampaikan Empat Pilar MPR RI secara menyeluruh dan utuh, salah satunya dikatakan Bapak Aditiya Fajarsyah bahwa :

> "Sebenarnya kompetensi apa yang dimilliki anggota MPR sehingga mampu dan dianggap kompeten mensosialisasikan hal-hal yang dianggap sakral utamanya seperti Pancasila yang teoritik dan sakral".[21]

Merespons hal ini Kepala Biro Persidangan dan Sosialisasi memberikan pandangan lain, selain pengetahuan tentang Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan *Bhinneka Tunggal Ika* dipahami anggota MPR sejak di tahap pendidikan dasar hingga yang paling tinggi S3. MPR RI juga telah melaksanakan kegiatan orientasi yang dilaksanakan sebelum 692 turun langsung ke masyarakat dan organisasi memberikan pemahaman Empat Pilar MPR RI, seperti dikatakan oleh Bapak Muhammad Rizal bahwa;

> "Seluruh anggota MPR kita undang untuk melaksanakan orientasi di dalam orientasi disampaikan materi lewat bahan tayang yang akan mereka gunakan sendiri, namun tidak semua anggota MPR ikut, kita memang tidak memebebankan kewajiban untuk hadir, namun karena telah ada kewajiban dia untuk melakukan sosialisasi dia perlu untuk menguasainya karena ada Undang-Undangnya yang menyebutkan bahwa tugas dan kewajiban

---

[20] Hasil Wawancara dengan Informan Yuyus Kardiman, M.Pd. 17 Maret 2016 di Laboratorium Sosial Politik FIS – UNJ.

[21] Hasil Wawancara dengan Informan Aditiya Fajarsyah, S.Pd. 10 Maret 2016 di Ruang Guru SMAN 21 Jakarta.

> anggota itu memasyarakatkan empat pilar. kami sudah siapkan kok programnya, anggarannya".[22]

Senada dengan Kepala Biro Persidangan dan Sosialisasi MPR RI, Bapak Endang Sapari juga beranggapan bahwa Anggota MPR adalah anggota atau orang yang terpilih sudah sejak pemilihan umum legislatif dipilih langsung dari rakyatnya lewat mekanisme partai yang mengusungnya dan khususnya 45 orang yang berkarir di Badan Sosialisasi merupakan orang yang telah disaring dan mewakili 10 fraksi yang ada di DPR dan DPD. Bapak Endang Sapari, mengatakan bahwa :

> "Kalau untuk bentuk pembinaan, pendalaman atau pematangan materi sebelum sosialisasi itu tidak ada. narasumber ini kan sudah orang terpilih, merupakan anggota MPR yang memang terpilih dalam arti memiliki kualifikasi; pemahaman, pengetahuan terutama untuk mensosialisasikan materi sosialisasi empat pilar, Anggota MPR ini dianggap sudah memiliki kriteria tersebut dan itu tidak seluruh anggota MPR. dibentuk suatu Badan Sosialisasi yang orang-orang ini pengajuannya melalui fraksi-fraksi dan DPD. Jadi Pimpinan MPR meminta kepada fraksi-fraksi itu siapa saja yang akan mewakili di Badan Sosialisasi MPR diminta yang mampu dan kompeten. jadi tidak begitu saja mengikutkan dan menentukan Narasumber sosialisasi Empat Pilar MPR RI, Merupakan suatu Badan yang dibentuk MPR yang berasal dari 10 fraksi DPR dan DPD yang dipilih sebanyak 45 orang yang dianggap mampu dan punya keahlian mensosialisasikan terpilih dari 500 lebih anggota MPR".[23]

Dapat disimpulkan, bahwa Anggota MPR yang melaksanakan sosialisasi Empat Pilar yang seluruhnya berjumlah 692 orang adalah orang terpilih yang menurut pihak MPR sudah paham dan memiliki kompetensi mendalam mengenai Empat Pilar MPR, namun terpilih bukan berarti yang terbaik, pemahaman mengenai Empat Pilar bukanlah pengetahuan umum yang dimiliki sejak lahir,

---

[22] Hasil Wawancara dengan *Key* Informan Muhammad Rizal, S.H., M.Si. 6 April 2016 di Ruang Kepala Biro Persidangan dan Sosialisasi MPR RI.

[23] Hasil Wawancara dengan *Key* Informan Endang Sapari, S.IP. 28 Maret 2016 di Ruang Biro Persidangan dan Sosialisasi.

melainkan melalui proses belajar yang mendalam inilah kritik dari Akademisi PPKN tentang kompetensi pendidikan.

Latar belakang pekerjaan Anggota DPR RI hanya 23.25% yang fokus berkerja sebagai anggota DPR RI. Bahwa terbesar adalah pengusaha 37.45%, Dosen sebesar 7.20%, swasta sebesar 11.81%, seniman atau artis 1.29%, pemuka agama1.29%, peneliti 0.55%, menteri atau kepala daerah 2.21%, professional atau praktisi (Pengacara, Guru, Dokter dsb.) sebesar 8.86%. dalam keanggotan DPD RI tercatat latar belakang pekerjaan pengusaha atau wiraswasta mendominasi dengan presentase 19.8%, Anggota DPR 19%, Dosen 15.1%, swasta 12.7%, kalangan professional (Pengacara, Guru, Dokter dsb.) sebanyak 6.4% dan aktivis LSM sebesar 4%.

Salah satu informan memberikan penekanan bahwa apakah anggota MPR mampu fokus terhadap apa yang dikerjakannya sebagai anggota legislatif khususnya mendapat tugas tambahan sebagai sosialisator Empat Pilar MPR RI, seperti yang diungkapkan Ibu Eni Sanasih, bahwa :

> "MPR bisa saja berperan seperti BP-7, namun anggota MPR juga mempunyai banyak paripurna-paripurna dan banyak tugas sebagai anggota legislatif, mungkin cukup berat apabila tugas seperti ini juga dibebankan kepada anggota MPR apalagi kalau masih ada yang berbisnis, berartis".[24]

Anggota MPR sekaligus Ketua Badan Sosialisasi MPR RI, Bapak Ahmad Basarah, memberikan repon bahwa :

> "Pelaksanaan sosialisasi empat pilar MPR bagi Pimpinan dan Anggota Badan Sosialisasi sudah menjadi rutinitas. Terakhir saya mensosialisasikan dengan metode outbound bersama mahasiswa. untuk kegiatan sebelum pelaksanaan kami memiliki orientasi yang sudah dilaksanakan, sebelum berjalannya

[24] Hasil Wawancara dengan Informan Eni Sanasih Rusman, S.Pd. 24 Maret 2016 di Ruang Wakil Kepala Sekolah SMPN 47 Jakarta.

> sosialisasi empat pilar MPR pada periode anggota MPR 2014-2019, disana pula ditampilkan materi-materi yang digunakan untuk sosialisasi empat pilar. Kegiatan sosialisasi MPR ini terdiri dari kegiatan sosialisasi langsung dan lewat media. Kegiatan sosialisasi secara langsung dilakukan oleh seluruh anggota MPR sebanyak 693 orang. Kegiatan dilakukan selama masa reses sebanyak 4-5 kali di daerah pemilihan masing-masing kepada konstituen".[25]

Tindak Pidana Korupsi Anggota MPR RI - 2015

Sementara dari pelaku korupsi, KPK menangani sebanyak 19 perkara yang melibatkan anggota DPR/DPRD, Pada 2016 tindak pidana korupsi (TPK) yang melibatkan anggota DPR RI yang berasal dari Komisi V DPR RI, Fraksi PDI-Perjuangan Damayanti Wisnu Putranti. Latar belakang korupsi di DPR banyak terjadi dalam proses penyalahgunaan anggaran dan penyuapan.[26]

Salah satu indikator kelayakan lembaga negara yang diakui adalah bebas korupsi, belakangan ini DPR sempat menggaduhkan publik dengan skandal "Papa Minta Saham" pada akhir 2015, yang mengakibatkan mundurnya Ketua DPR RI – Setya Novanto dari Pimpinan DPR RI. Tidak salah apabila publik menuntut pada MPR bahwa MPR harus bersih dari korupsi apabila ingin mensosialisasikan ke Empat Pilar MPR RI yang banyak mengandung nilai-nilai kebangsaan yang tinggi dan sakral, seperti diungkapkan informan Bapak Yuyus Kardiman, bahwa :

> Pertama ketika berbicara empat pilar MPR sudah selayaknya anggota MR tidak ada lagi yang *corrupt,* sudah selayaknya anggota MPR yang melanggar hukum, karena sangat ironi nilai-nilai kebangsaan yang sangat tinggi itu justru mereka sendiri yang melanggarnya. jadi untuk persoalan itu perlu kompetensi khusus bagi yang mensosialisasikan tentunya harus dimiliki anggota MPR. sehingga perlu dikaji ulang hingga sistem pemilu kita.[27]

---

[25] Hasil Wawancara dengan *Key* Informan Drs. H. Ahmad Basarah, M.H. 27 April 2016.
[26] *Ibid*, hlm 17.
[27] Hasil Wawancara dengan Informan Yuyus Kardiman, M.Pd. 17 Maret 2016 di Laboratorium Sosial Politik FIS-UNJ.

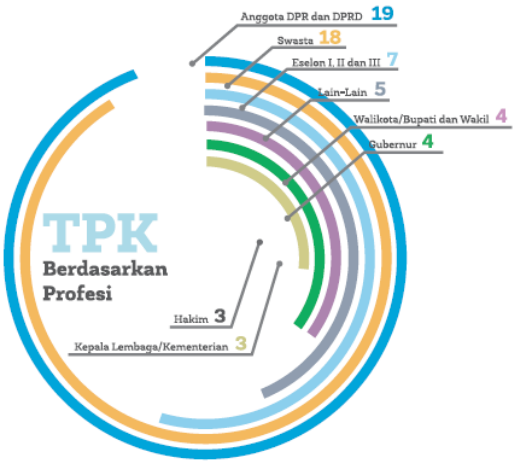

Grafik 3. Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Profesi[28]

Catatan criminal yang bersih dan tidak adanya perilaku melawan hukum khususnya pada tindak pidana korupsi pada lembaga negara, sudah tentu akan memberikan legitimasi atau pengakuan dari publik bahwa lembaga tersebut layak dicontoh atau ditiru. Dalam hal ini Majelis Permusyawaratan Rakyat ikut turun tangan memberikan pembinaan dan bimbingan kepada anggotanya sehingga masyarakat dapat diberikan contoh implementasi Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara melalui *role model* yang mewakilkan lapisan masyarakat di MPR RI.

4.3.3. *Personal Branding* Aktualisator Pancasila

Upaya beberapa Anggota MPR RI khususnya Pimpinan MPR RI dan Badan Sosialisasi MPR RI dalam membangun citra positif dengan mengangkat artikel dan rubrik berita pada media-media cetak lokal dan elektronik belum mampu menghilangkan kesan ketidaksesuaian *elite* politik MPR RI sebagai Aktualisator Pancasila pertama, masih ditemukan Anggota MPR RI yang menonjolkan *in group*

[28] Komisi Pemberantasan Korupsi, *Laporan Tahunan KPK 2015* (Jakarta, KPK: 2015) hlm. 16.

dalam suatu partai politik ditengah merosotnya kepercayaan masyarakat atas kinerja dan loyalitas partai politik.

Kuatnya citra Anggota MPR RI sebagai *elite* politik Senayan juga disampaikan oleh Eni Sanasih Rusman, bahwa :

> "MPR bisa saja berperan seperti BP-7, namun anggota MPR juga mempunyai banyak paripurna-paripurna dan banyak tugas sebagai anggota legislatif, mungkin cukup berat apabila tugas seperti ini juga dibebankan kepada anggota MPR apalagi kalau masih ada yang berbisnis, berartis. BP-7 sudah bagus dulu Pancasila benar-benar ditatar sampai hafal. penatarnya juga dari dosen-dosen jadi mampu untuk mensosialisasikan ideologi seperti itu, berbeda dengan yang dilakukan MPR RI kan dilakukan orang politik mungkin saja nanti malah kampanye untuk diri sendiri"[29].

Tanggapan serupa juga disampaikan oleh Muhammad Fauzi yang merasa terganggu apabila Anggota MPR yang seharusnya berperan sebagai Aktulisator Pancasila lebih memanfaatkan wadah sosialisasi Empat Pilar MPR untuk mengkampanyekan hasil kerja yang telah dicapai sebagai *elite* legislatif :

> Perlu juga ada teguran apabila ada anggota MPR yang korupsi atau tidak layak karena seringkali menggunakan forum empat pilar MPR RI sebagai sarana kampanye gratisan dan publikasi untuk dirinya sendiri. saya pernah menemukan sosialisasi di daerah yang ada embel-embel pribadi anggota dewan[30].

[29] Hasil Wawancara dengan Informan, Eni Sanasih Rusman, S.Pd., 24 Maret 2016 di Ruang Wakil Kepala Sekolah SMPN 47 Jakarta.

[30] Hasil Wawancara dengan Informan Muhammad Fauzi, S.Pd. 3 April 2016.

Gambar 6. Aktualisator Pancasila identik dengan atribut Partai Politik.

Biro Persidangan dan Sosialisasi telah mengupayakan untuk memberikan sarana kepada Anggota MPR RI melalui *banner* atau spanduk yang netral tanpa adanya unsur dukungan partai politik, seperti yang diungkapkan oleh Kepala Sub. Dukungan Pelaksanaan Sosialisasi, Bapak Endang Sapari bahwa :

> "Selain itu ada alat publikasi yang disediakan oleh Biro Persidangan dan Sosialisasi seperti Spanduk Sosialisasi yang memberikan penegasan disitu bahwa Pancasila diangkat sebagai dasar negara dan ideologi, umumnya digunakan sebagai backdrop ketika sosialisasi".[31]

[31] Hasil Wawancara dengan *Key* Informan Muhammad Rizal, S.H, M.Si. 6 April 2016 di Ruang Kepala Biro Persidangan dan Sosialisasi MPR RI.

Gambar 7. Aktualisator Pancasila dengan atribut MPR RI.

Spanduk atau alat publikasi yang netral umumnya hanya digunakan oleh Pimpinan MPR RI dan Anggota Badan Sosialisasi MPR RI. sehingga dari total 692 Aktualisator Pancasila mayoritas masih menonjolkan *in group* atau sebagai bagaian dari kelompok dan partai politik. *Personal Branding* yang tepat tentunya akan memberikan legitimasi kepada Aktualisator mensosialisasikan Pancasila, Indonesia pernah memiliki Aktualisator Pancasila yang mampu membangun semangat nasionalisme dan patriotisme yakni Presiden Soekarno.

Kedua untuk menjalankan peran sebagai Aktualisator Pancasila sorotan publik terhadap penguasaan konten Pancasila yang komperhensif, bahwa yang harus disampaikan kepada publik tidak hanya sebatas definisi dan kesejarahan, jauh lebih dari itu menyentuh ranah subtantif dan aplikatif seperti yang diungkapkan oleh Iwan Sajali bahwa :

> "Untuk anggota MPR harus benar-benar menguasai konten Pancasila karena yang disampaikannya ini bukan main-main. ini ideologi negara sangat fatal apabila mereka tidak tahu apa yang disampaikannya. sehingga mengaktualisasikan Pancasila itu perlu pemahaman yang lengkap"[32].

Menurut Ketua Badan Sosialisasi, Anggota MPR RI adalah orang terpilih dari berbagai daerah pemilihan di seluruh Indonesia, disaring melalui mekanisme Partai Politik yang di dalamnya ada muatan ideologis dan proses ini umumnya dilalui oleh Mayoritas Anggota MPR yang berasal dari Partai Politik lebih jelas disampaikan Bapak Ahmad Basarah bahwa :

> "Anggota MPR RI kan tepilih pasti masyarakat sudah bisa menilai, pendalaman ideologis umumnya sudah diberikan di partai namun kemampuan anggota MPR yang berkewajiban melakukan kegiatan sosialisasi ini perlu ditingkatkan. Memang tidak mudah untuk menyampaikan materi-materi yang menyangkut nilai-nilai Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara tanpa sebuah pemahaman yang utuh, tanpa kemampuan untuk berbicara di depan publik. Tanpa memiliki kedua hal itu, tentu saja pesannya tidak sampai. Kita menyadari tidak semua anggota MPR punya ketertarikan dan talenta untuk menyampaikan materi sosialisasi sehingga perlu dicari suatu cara yang bisa meningkatkan kemampuan anggota MPR dalam menyampaikan materi sosialisasi di daerah pemilihannya masing-masing".[33]

Ketiga adalah aktivitas dan kerja Aktualisator Pancasila haruslah mencerminkan Pancasila khususnya dalam ranah aplikatif sehari-hari. pentingnya Anggota MPR RI mencontohkan kehidupan berPancasila ditegaskan oleh Bapak Yuyus Kardiman bahwa :

> "Secara tidak langsung masalah, isu-isu yang berkembang di masyarakat menjadi fokus sosialisasi, namun mengkaitkan dengan Pancasila lebih baik ditunjukan langsung seperti implementasinya dalam sila ke 4, yang belum dipenuhi anggota MPR lebih sering *voting* dari pada bermusyawarah".[34]

---

[32] Hasil Wawancara dengan Informan Iwan Sajali, S.Pd. 24 Maret 2016 di Ruang Guru SMKN 7 Jakarta.

[33] Hasil Wawancara dengan *Key Informan*, Drs. H. Ahmad Basarah, M.H., 27 April 2016.

[34] Hasil Wawancara dengan Informan, Yuyus Kardiman, M.Pd. 15 Maret 2016 di Laboratorium Sosial Politik FIS-UNJ.

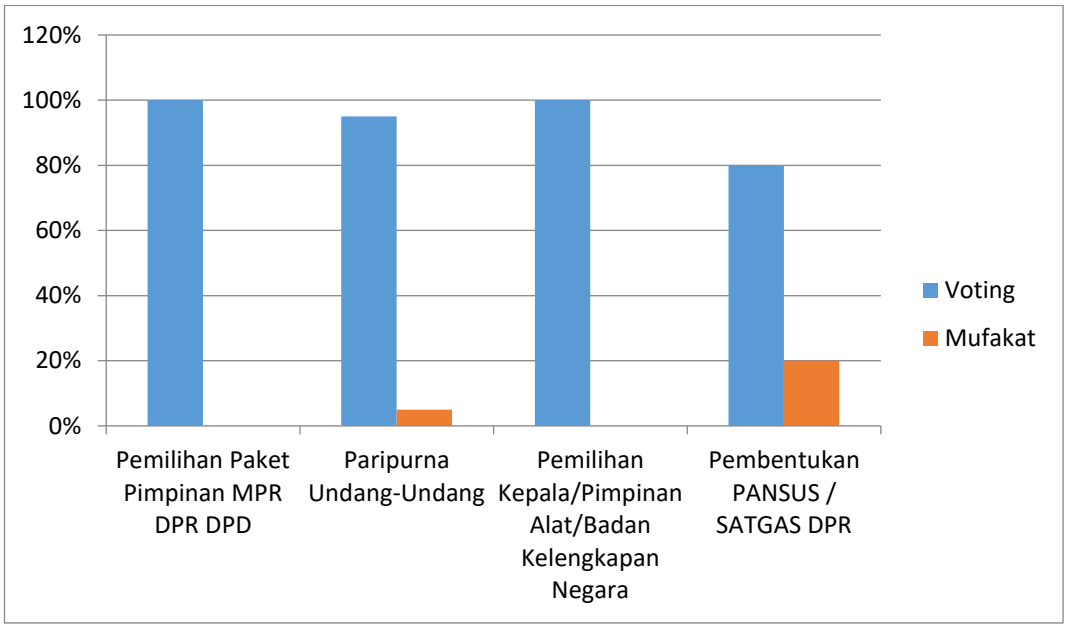

Grafik 4. Intensitas pelaksanaan voting dan mufakat.

Dari Laporan Pimpinan DPR RI tahun 2014-2015 kuantitas pengambilan suara DPR RI 100% di dominasi oleh *voting* terutama dalam pengambilan keputusan paket Pimpinan lembaga MPR, DPR, DPD. Mekanisme voting sudah lumrah digunakan MPR, DPR dan DPD dalam pengambilan keputusan krusial 95% dalam pembuatan dan persetujuan paripurna terhadap suatu Undang-Undang dan keputusan sidang paripurna DPR lainnya seperti pemilihan Kepala Badan/Alat Kelengkapan Negara 100% dan pembentukan SATGAS atau Pansus yang ditentukan dengan pengambilan voting sebanyak 80%.

4.3.4. Proses Penerimaan Pancasila sebagai Empat Pilar MPR

Pancasila sebagai Ideologi dan dasar negara, tercantum dalam konstitusi negara meskipun beberapa kali mengalami pergantian dan perubahan konstitusi. Ini menunjukkan bahwa Pancasila merupakan konsensus nasional dan dapat diterima oleh semua kelompok masyarakat Indonesia. Pancasila terbukti mampu memberi kekuatan kepada bangsa Indonesia, sehingga perlu dimaknai, direnungkan, dan diingat oleh seluruh komponen bangsa.[35]

Umumnya Pancasila dijelaskan sebagai Empat Pilar MPR RI oleh 692 Anggota MPR RI dengan berbagai cara, umumnya Anggota MPR RI melaksanakan ceramah dan diskusi dengan peserta. Penyampaian Pancasila berdasarkan bahan tayang *power point* yang berisikan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, sejarah perumusan Pancasila sebagai dasar negara hingga intisari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dalam sosialisasi langsung disampaikan kepada peserta sosialisasi.

Peserta sosialisasi memahami materi Pancasila melalui mendengarkan langsung materi yang disampaikan Anggota MPR, membaca buku penunjang sosialisasi yang memuat sejarah Pancasila, rumusan Pancasila, Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara, tantangan kekinian dan menghadapinya. Melalui indera pendengar dan penglihat peserta memperoleh pengetahuan tentang nilai Pancasila, kebaikan, keburukan, dan manfaatnya bagi kehidupan.

---

[35] Badan Sosialisasi, *Op.Cit.,* hlm. 7.

Meskipun media yang baik hanya sedikit menolong, apabila Anggota MPR RI menyampaikan tidak dengan pemahaman yang utuh, tanpa kemampuan untuk berbicara di depan publik. Dalam pendidikan suatu proses belajar terdiri dari dua unsur yang sangat penting adalah metode dan media, kedua aspek itu saling berkaitan. pemilihan metode akan menentukan jenis media yang akan digunakan. Seluruh informan, yang mayoritas menerima sosialisasi Empat Pilar dengan menggunakan metode ceramah, memiliki tanggapan yang seragam, salah satunya diungkapkan oleh Ibu Eni Sanasih Rusman, bahwa :

> "Tayangan-tayangan *power point* cukup banyak slidenya pertama ada Pancasila hingga menayangkan ketetapan-ketetapan MPR, Slidenya cukup singkat ya, tidak power text. Pancasila hanya sekilas saja apabila di PPT. untungnya peserta dibekali buku-buku yang diberikan MPR ada juga majalah-majalah dari MPR itu sendiri cukup bagus, tapi sulit di dapat lagi diluar MPR".[36]

MPR RI juga membenarkan bahwa materi Pancasila yang disediakan dan diberikan kepada peserta hanyalah bahan tayang power point dan beberapa buku penunjang, seperti yang dinyatakan oleh Kepala Sub. Dukungan Sosialisasi MPR RI, Bahwa Endang Sapari, bahwa :

> "Media hanya bahan tayang powerpoint dan buku-buku saja ada 5 jenis. Tidak pernah ada Angggota yang membuat sendiri".[37]

---

[36] Hasil Wawancara dengan Informan, Eni Sanasih Rusman, S.Pd., 24 Maret 2016 di Ruang Wakil Kepala Sekolah SMPN 47 Jakarta.

[37] Hasil Wawancara dengan *Key* Informan, Endang Sapari, S.IP. 28 Maret 2016 di Ruang Biro Persidangan dan Sosialisasi MPR RI.

4.3.5. Proses Merespon Pancasila sebagai Empat Pilar MPR RI

Proses merespon nilai Pancasila dilakukan setelah peserta sosialisasi mendapatkan pengetahuan melalui sosialisasi. Respon berarti balasan atau tanggapan *(reaction),* reaksi terhadap rangsang yang di terima oleh panca indra. Hal yang menunjang dan melatarbelakangi ukuran sebuah respon adalah sikap, persepsi, dan partisipasi. Berdasarkan pengetahuan Pancasila yang telah diterima, peserta kemudian memberikan respon pada nilai Pancasila yang telah diterima. Respon setiap peserta sosialisasi berbeda-beda tergantung pada sikap, persepsi, dan partisipasi masing-masing individu.

4.3.5.1. Menerima Nilai

Urgensitas memahami Pancasila yang digalakan MPR RI disambut positif bahwa Pancasila saat ini tidak cukup diinternalisasikan melalui institusi formal pendidikan dengan respon yang diberikan beberapa informan, tergambar keresahan rendahnya pemahaman Pancasila saat ini dirasakan berdampak pada maraknya kasus-kasus sosial yang terjadi di lingkup masyarakat sehingga amanah dan tugas yang diberikan kepada MPR untuk mengukuhkan Pancasila, nasionalisme, patriotisme dan jiwa kebangsaan. sosialisasi Pancasila ini diharapkan menjadi panduan yang efektif dan nyata seperti yang diungkapkan oleh Mohamad Sodeli bahwa :

> “Sebenarnya Pancasila itu tanggung jawabnya semua pihak, kalau saya pribadi seharusnya bukan hanya MPR, tetapi kan lembaga-lembaga negara yang lain sudah mempunyai tugas pokok, dan fungsi yang cukup berat. Sehingga wajar MPR sebagai lembaga konstitutif, yang bertugas mengamandemen UUD NRI Tahun 1945, mengawal konsensus seperti

> Pancasila termasuk mensosialisasikan kepada masyarakat, hanya menurut saya tidak hanya MPR semestinya, ini harus ada suatu gerakan nasional, yang melibatkan semua Pendidikan dan unsur media massa minimal televisi yang menyampaikan hasil-hasil apa tidak hanya Pancasila tetapi hak-hak dan kewajiban warga negara, kemudian hasil-hasil amandemen itu yang diwajibkan pememerintah, durasinya 1 menit dengan intensitas penayangan minimal 3 kali sehari, tentang Pancasila dan konsesnsus lainnya agar semua tergerak. sekarang MPR tentu tugas dan fungsinya terbatas. MPR menangani seluruh rakyat Indonesia. yang selama ini MPR melaksanakannya monoton tidak melibatkan media massa, biasanya ceramah. apabila MPR mengemasnya dalam bentuk iklan bahwa "Pancasila itu adalah milik kita" di dengungkan terus saya yakin masyarakat akan bergerak dan muncul suatu gerakan menangkal liberalisme yang masuk dari berbagai media. Kalau dahulu kan kita antipati dengan model penataran yang dianggap indoktrinasi tetapi masih lebih baik dari pada sekarang yang sudah lepas sama sekali, tinggal diganti saja polanya jangan menggunakan indoktrinasi kepada masyarakat. Nilai-nilai Pancasila itu disampaikan disampaikan melalui contoh dan memahami perkembangan masyarakat".[38]

Dalam respon yang diberikan Bapak Mohamad Sodeli tergambar bahwa urgensitas pemberian pemahaman Pancasila oleh MPR RI disambut positif karena saat ini masyarakat yang sudah diakomodir oleh institusi pendidikan formal melalui Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan mendapatkan pemahaman langsung oleh para pejabat negara, sehingga sosialisasi ini memiliki urgensitas yang jelas, hal ini juga diungkapkan oleh Ibu Eni Sanasih Rusman bahwa:

> "Penting sekali apa yang disampaikan oleh narasumbernya meskipun secara materi mungkin sudah dipahami guru, namun karena kondisi sosial masyarakat saat ini tengah menjadi krusial karena selama ini kita sudah mulai menjauh dari Pancasila, banyak kriminalitas yang bukan karena ekonomi lagi, motifnya sudah tidak berprikemanusiaan dan tidak menunjukan bahwa kita adalah bangsa yang beradab, sehingga saya bisa menangkap pesan MPR yang ingin berperan menangani ini lewat sosialisasinya".[39]

---

[38] Hasil Wawancara dengan Informan, Mohamad Sodeli, M.Pd., 10 Maret 2016 di Ruang Wakil Kepala Sekolah SMAN 44 Jakarta.

[39] Hasil Wawancara dengan Informan, Eni Sanasih Rusman, S.Pd., 24 Maret 2016 di Ruang Wakil Kepala Sekolah SMPN 47 Jakarta.

MPR yang ingin menunjukan kepada peserta sosialisasi bahwa pemahaman Pancasila sudah kritis di level masyarakat juga dijelaskan oleh Kepala Biro Persidangan dan Sosialisasi, Bapak Muhammad Rizal bahwa :

> "Karena yang kami inginkan bukan hanya hafal Pancasila melainkan melaksanakan Pancasila dalam kehidupan tiap peserta, di internalisasikan dalam diri dia, menularkan juga pada masyarakat lain nilai-nilai Pancasila itu. materi yang disampaikan lima sila aplikasinya seperti apa, tentang kemanusiaan kita bertanya apa sudah menerapkan nilai-nilai kemanusian belum, kita empati pada orang yang susah, menolong orang, tidak memilih dan diskriminasi, apakah ketika ada pencurian kita ikut memukul hingga membunuh, apakah kita biarkan atau kita ikut memukuli orang itu dan itu bukan nilai kita. yang mencuri motor di pasar bisa langsung dibakar, dihakimi ala jalanan sudah banyak terjadi kasus-kasus semacam itu. pencurian apa-apa sudah babak belur dia. itulah tugas kita untuk mengingatkan kembali nilai-nilai kemanusiaan, itukan nilai-nilai Pancasila semua. nilai persatuan, kalau kita masih sering provokasi, percaya isu itu tidak sesuai Pancasila dan akan mengancam keuutuhan NKRI kita".[40]

4.3.5.2. Menolak Nilai

Dimuatnya Pancasila dalam sosialisasi Empat Pilar MPR RI masih menjadi kontroversi tersendiri, tidak terkecuali dari kalangan Akademisi PPKN yang menilai tidak tepat memposisikan Pancasila hanya sebagai Pilar, karena sejak awal sejarahnya dalam sidang BPUPKI Pancasila di rancang saat perumusan dasar negara yang diproyeksikan sebagai dasar negara Indonesia, Hampir seluruh informan memberikan respon ketidaksepemahaman atas penyebutan Pancasila sebagai Pilar MPR RI, salah satunya berasal dari Bapak Aditiya Fajarsyah, yang mengemukakan bahwa :

> "Sebelumnya kan sudah banyak yang protes dengan adanya sosialisasi Empat Pilar, karena sebutan dan peletakan Pancasila dalam Empat Pilarnya. Sampai sekarang banyak orang beranggapan Pancasila itu bagian dari empat pilar itu, sudah terlanjur. jadi banyak yang berpikiran seperti itu. Sebetulnya kita dari

[40] Hasil Wawancara dengan *Key* Informan Muhammad Rizal, S.H, M.Si. 6 April 2016 di Ruang Kepala Biro Persidangan dan Sosialisasi MPR RI.

> pihak MGMP sudah melakukan forum diskusi dengan lembaga terkait dan menyampaikan Pancasila tidak pantas sebagai pilar, dan sekarang sudah sampai ke MK bahwa harus ada koreksi untuk itu. Waktu ditanyakan kepada MPR jawaban dari mereka hanya penamaan saja".[41]

Pancasila tidak bisa dibiarkan terinternalisasikan ke beberapa lapisan masyarakat melalui Sosialisasi Empat Pilar MPR RI yang sebelumya bernama Empat Pilar Kehidupan Bernegara karena berbeda dengan paradigm Pancasila dalam konsep mata pelajaran PPKn yang menempatkan khusus terhadap Pancasila, Secara keseluruhan pandangan Pancasila yang akan diaktualisasikan sebagai Empat Pilar MPR RI, Bapak Iwan Sajali memberikan pandangan bahwa :

> "Ketidaksepakatan itu yang membuat saya tertarik. artinya kan empat pilar itu kan sejajar, pilar itukan tiang atau tonggak kebangsaan yang pertama Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, NKRI dan *Bhinneka Tunggal Ika.* kalau dikonsepkan empat pilar begitu tidak tepat. Pancasila itu bukan pilar dalam konteks PPKn. Pancasila adalah sebagai dasar, bukan pilar letak yang tepat adalah fondasi, bukan pilar bukan yang menopang. terus yang kedua adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia bukan pilar juga tetapi pagar. siapapun yang memasuki wilayah Indonesia harus melewati pagar tersebut sebagai perwujudan konstitusi Indonesia. NKRI itu juga bukan pilar itu adalah rumah, dimana NKRI itu adalah wadahnya bangsa Indonesia. terakhir *bhinneka tunggal ika* itulah isi dari Indonesia adalah keragaman, multikultural dan itu melebihi dari pilar itu. itulah mengapa saya tidak setuju dengan pilar karena suatu saat akan jatuh".[42]

MPR RI memberikan tanggapan, bahwa pemberian atau masalah menginternalisasikan Pancasila sebagai Empat Pilar MPR RI hanyalah taraf formalitas, dalam taraf subtansialnya Pancasila mendapatkan penegasan sebagai ideologi dan dasar negara, saat ini urgensitas untuk menggiatkan kembali Pancasila

---

[41] Hasil Wawancara dengan Informan, Aditiya Fajarsyah, S.Pd., 10 Maret 2016 di Ruang Guru SMAN 21 Jakarta.

[42] Hasil Wawancara dengan Informan, Iwan Sajali, S.Pd., 24 Maret 2016 di Ruang Guru SMKN 7 Jakarta.

dan nilai-nilai kebangsaan jauh lebih penting, hal ini diungkapkan oleh Ketua Badan Sosialisasi MPR RI bahwa :

> "Dalam konteks nama program sosialisasi, dulu Pak Taufiq Kiemas menyebut nama kegiatan sosialisasi dengan Sosialisasi Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara. Tidak ada yang salah dari penggunaan nama itu. Pimpinan MPR telah bertanya dan berkonsultasi dengan Pusat Pengembangan Bahasa Indonesia. Kepala Pusat Pengembangan Bahasa Indonesia pada waktu itu mengatakan istilah Empat Pilar dapat dibenarkan, karena istilah "pilar" juga mengandung pengertian sesuatu yang pokok atau sesuatu yang induk. Jadi bukan hanya dalam pengertian awam bahwa pilar itu adalah tiang-tiang yang sejajar sehingga kemudian tafsirnya seolah-olah nilai-nilai Pancasila itu sejajar dengan nilai-nilai lainnya. Penyebutan pilar bukan untuk menyamakan posisi Pancasila dengan nilai-nilai berbangsa dan bernegara lainnya, tetapi Pancasila tetap difungsikan sebagai dasar atau ideologi negara. Namun, Badan Sosialisasi maupun Pimpinan MPR menghormati putusan MK. Karena itu, Badan Sosialisasi nanti akan merumuskan sebuah terminologi baru dimana kita tetap menghargai keputusan MK, tetapi kita juga mempertimbangkan aspek komunikasi politik MPR dalam melaksanakan kegiatan sosialisasi ini karena istilah Empat Pilar sudah memiliki posisi tersendiri di masyarakat atau sudah punya *branding*. Ini bukan perkara mudah untuk membuat *branding* baru. Kita akan mencari satu formula nama program ini agar tidak menimbulkan perdebatan yang tidak perlu di tengah masyarakat".[43]

4.3.6. Proses Seleksi Nilai dan Pengetahuan Pancasila

Proses ini berlangsung setelah peserta mengikuti kegiatan sosialisasi, Peserta menerima beberapa nilai dan pengetahuan Pancasila melalui penyampaian materi Empat Pilar MPR RI. Beberapa nilai da yang telah dimiliki sebelumnya akan diseleksi dengan nilai yang sudah *established* atau mapan. Bahwa tidak semua nilai dan pengetahuan yang diberikan saat sosialisasi diterima utuh melainkan disesuaikan dengan apa yang dibutuhkan, apa yang penting untuk diketahui seperti yang diungkapkan Bapak Yuyus Kardiman, bahwa :

> "Pancasila memiliki banyak konten, secara metodologi sosialisasi hanya berlangsung satu arah, padahal kunci dari sosialisasi adalah internalisasi nilai

[43] Hasil Wawancara dengan *Key Informan*, Drs. H. Ahmad Basarah, M.H., 27 April 2016.

> dari empat pilar MPR itu, sampai 3 kali saya ikuti prosesnya masih tetap sama seremonial saja. Kedua inikan kegundahan khususnya MPR terhadap persoalan bangsa. berkaitan dengan aktualisasi nilai-nilai Pancasila sehingga muncul konsep empat pilar MPR untuk membangkitkan kembali dan secara obyektif positif, sebaiknya MPR lebih detail menjelaskan implementasi Pancasila yang praktis telah dilakukan MPR".[44]

Sasaran Empat Pilar MPR RI umumnya adalah guru dan kalangan akademisi PPKN sehingga nilai dan pengetahuan umum mengenai Pancasila tentunya sudah dimiliki, sehingga partisipan hanya menginginkan informasi praktis-praktis dan operasional saja tentang implementasi Pancasila di kalangan Anggota MPR RI seperti yang diungkapkan oleh Aditiya Fajarsyah, bahwa :

> "Akan lebih berdampak apabila langsung diberikan contoh oleh para pejabat di MPR, Jikalau mau disosialisasikan materinya dibagian praktis-praktis saja, karena teorinya kan sudah di dapat di sekolah. Dibuktikan kalau tidak dicontohkan Pancasilais, siapa yang mau ikut nanti bertidak seperti Pancasilais, sekarang Bangsa mana yang mau memakai Pancasila, selain Indonesia, padahal nilai-nilai yang dikandungnya universal layak juga disejajarkan dengan ideologi besar lainnya".[45]

4.3.7. Proses Internalisasi Pancasila

Proses menghayati nilai mengandung makna mengalami dan merasakan nilai-nilai Pancasila tersebut dalam batinnya. Hal ini berarti ada perubahan dalam diri seseorang itu dari belum memiliki nilai tersebut menjadi memiliki, atau dari sudah memiliki nilai tersebut tetapi masih lemah dalam mempengaruhi perilakunya menjadi memiliki nilai tersebut lebih kuat mempengaruhi perilakunya. Umumnya terjadi proses penguatan sesuatu yang telah ada dalam diri peserta sehingga membangun kesadaran dalam dirinya bahwa sesuatu tersebut sangat berharga.

---

[44] Hasil Wawancara dengan Informan, Yuyus Kardiman, M.Pd. 15 Maret 2016 di Laboratorium Sosial Politik FIS-UNJ.

[45] Hasil Wawancara dengan Informan, Aditiya Fajarsyah, S.Pd., 10 Maret 2016 di Ruang Guru SMAN 21 Jakarta.

Pembelajaran Pancasila hendaknya dilakukan secara terus menerus sebagai upaya proses internalisasi dan pembudayaan nilai Pancasila melalui aktifitas beragam, tidak terbatas pada kegiatan kelas dan seminar, sebaliknya dilakukan melalui cara-cara yang menyenangkan diluar kegiatan belajar mengajar.[46] Dalam persepektif seperti pengajaran ini, para pendidik (guru, dosen, narasumber) tidak lebih sebagai fasilitator dan inspiratory bagi peserta didik untuk berpikir alternatif dan terbuka untuk melakukan refleksi kritis terhadap kandungan dan praktik sehari-hari nilai etika Pancasila.[47]

Pentingnya internalisasi Pancasila sebagai rangkaian Empat Pilar MPR RI dalam ranah pendidikan sangat ditekankan oleh Bapak Mohamad Sodeli, yang menjelaskan bahwa :

> Kurikulum PPKn itu sebetulnya ruang lingkupnya dan intinya Empat Pilar itu. Saya termasuk dan terlibat pada penysusunan KD pada kurikulum 2013 garis besarnya ada 4, pertama Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI dan *Bhinneka Tunggal Ika.* Nah kalau KD-KD yang ada di PPKn itu mengacu pada ruang lingkup itu sebenarnya. misalnya mengenai KD Hak Asasi Manusia itu tinjauannya bisa prespektif Pancasila dan tinjauan UUD NRI Tahun 1945. atau misalnya terkait dengan persatuan kesatuan itu prespektifnya atau rumah besarnya Pancasila dan *Bhinneka Tunggal Ika.* jadi kurikulum PPKn dari SD, SMP, SMA termasuk Alliyah dan SMK itu di dalamnya Empat Pilar. tentunya ada kordinasi juga dengan MPR sebelum kurikulum itu diberlakukan kita kan sampaikan itu ke DPR-MPR RI. Lewat Tim dari Kementrian Pendidikan bahwa rumah besar dari materi PPKn adalah Empat Pilar MPR RI. itu disebutkan dalam setiap KD nya, misalkan apabila KD nya menyebutkan Keberagaman rumah besarnya *Bhinneka Tunggal Ika.*[48]

---

[46] Ubaedillah dan Razak. *Op.Cit,* hlm. 34.
[47] *Ibid.*
[48] Hasil Wawancara dengan Informan, Mohamad Sodeli, M.Pd., 10 Maret 2016 di Ruang Wakil Kepala Sekolah SMAN 44 Jakarta.

Senada dengan Mantan Ketua MGMP PPKn SMA DKI Jakarta, MPR RI juga telah mengupayakan membangun integrase dengan ranah pendidikan, seperti diungkapkan oleh Ketua Badan Sosialisasi MPR RI, Bapak Ahmad Basarah bahwa:

> "menyangkut materi sosialisasi. Materi sosialisasi perlu disempurnakan, terutama menyangkut segmen-segmen masyarakat yang menjadi target *audience* dari kegiatan sosialisasi ini. Tentu materi yang disampaikan untuk kalangan pelajar dari SD hingga SMA tidak sama dengan mahasiswa atau para dosen dan sebagainya. Juga dengan segmen masyarakat yang lain. Karena itu, MPR perlu membuat satu variasi materi dan metodologi yang lebih efektif dan tepat untuk sasaran *audience* sehingga kegiatan sosialisasi dapat menyentuh aspek kognitif dan afektifnya. Badan Sosialisasi tengah memikirkan materi dan metodologi yang lebih efektif dan tepat".[49]

Meskipun belum ada integrasi yang komprehensif materi sosialisasi Empat Pilar MPR RI dengan Kurikulum PPKN atau PKN dipersekolahan, MPR bisa berperan lebih dari itu, yakni dengan mensosialisasikan Pancasila melalui perbuatan-perbuatan nyata dan melalui penafsiran Pancasila terhadap masalah melalui wawancara media massa atau diskusi dengan publik. seperti yang diungkapkan oleh Bapak Mohamad Sodeli, bahwa :

> "para narasumbernya hanya menyampaikan pokok-pokoknya tentang detail-detailnya, Pancasila itu kan harus disampaikan nilai-nilai praksisnya, yang selama ini disampaikan hanya nilai dasarnya. justru yang paling penting nilai-nilai prkasisnya yang disampaikan ke masyarakat. praksisnya itu terapan, praktik bisa disampaikan dalam wujud contoh dan keteladanan mereka. jadi tidak hanya normatifnya saja yang disampaikan."[50]

Namun menurut Iwan Sajali Pancasila sudah diinternalisasikan melalui seruan langsung dari narasumber bahwa :

> "Tentunya dicontohkan oleh narasumber bagaimana mengamalkan Pancasila dari hal yang paling sederhana, tidak mengungkit perbedaan, tidak boleh banyak musuh, beribadah sesuai agama. bersikap selayaknya bangsa besar.

[49] Hasil Wawancara dengan *Key Informan*, Drs. H. Ahmad Basarah, M.H. 27 April 2016.
[50] Hasil Wawancara dengan Informan, Mohamad Sodeli, M.Pd., 10 Maret 2016 di Ruang Wakil Kepala Sekolah SMAN 44 Jakarta.

> dari contoh tersebut Pancasila lah yang menjadi dasar tindakan saya menghadapi masalah".[51]

4.3.8. Proses Aktualisasi Pancasila

Aktualisasi merupakan tahapan akhir dalam proses internalisasi nilai. Penerapan ini akan terjadi setelah melalui proses penghayatan nilai. Seseorang yang telah menghayati nilai maka akan mendorong dirinya untuk mengaktualisasikan nilai tersebut dalam perilakunya termasuk Pancasila. Apabila Pancasila diaktualisasikan akademisi PPKN merupakan hal yang biasa seperti yang diungkapkan oleh Bapak Yuyus Kardiman bahwa :

> "Ketika terjadi fenomena LGBT, dikaji dari prespektif Pancasila selesai. Tidak usah dibicarakan, didiskusikan dan dibesarkan di media. seolah-olah LGBT dan hak asasi manusia sejajar dengan agama. dengan adanya prespektif Pancasila sudah selesai. Agama adalah sumber Pancasila, Agama menolak adanya LGBT. Pancasila menolak LGBT. Begitu juga dengan masalah separatisme dan terorisme selesai. Jadi tidak masalah apabila ada orang menyelesaikan suatu masalah berdasar hadist, sunnah, kitab agama islam, kristen, buddha, hindu, tidak masalah karena itu Pancasila".[52]

Tidaklah kesulitan para akademisi mengaktualisasikan Pancasila dalam kehidupan sehari-harinya, begitupula dalam ranah pendidikan. Guru dan Dosen berperan mengaktualisasikan Pancasila kepada peserta didik. Pancasila sudah dinternalisasikan sejak dini mulai dari SD melalui materi dasar PPKN hingga perguruan tinggi, praktik-praktik Aktualisasi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari juga sudah diinternalisasikan melalui pembagian kelompok, berdiskusi

[51] Hasil Wawancara dengan Informan, Iwan Sajali, S.Pd., 24 Maret 2016 di Ruang Guru SMKN 7 Jakarta.

[52] Hasil Wawancara dengan Informan, Yuyus Kardiman, M.Pd. 15 Maret 2016 di Laboratorium Sosial Politik FIS-UNJ.

mencapai mufakat, bertoleransi seperti yang diungkapkan oleh Aditiya Fajarsyah bahwa :

> "Pernah, tetapi tidak dominan karena yang saya dapat ketika penyampaian sosialisasi hanya sekedar sosialisasi saja. yang bisa saya sampaikan paling hanya perubahan-perubahan bernegara termasuk amandemen UUD NRI Tahun 1945 yang terakhir tahun 2002. Di materi PPKn SMA pun tidak ada Empat Pilar MPR RI itu, namun saya akan sampaikan ke murid-murid lewat contoh praksis Pancasila nya apabila dicontohkan narasumber pada saat sosialisasi. umumnya murid-murid sudah terbiasa berkelompok, bertukar pendapat, bermusyawarah sudah dibiasakan khasnya pelajaran PPKn disitu terasa Pancasilanya".

Tujuan sosialisasi Empat Pilar MPR RI bahwa Sosialisasi diberikan kepada Guru dan Dosen untuk membantu MPR mengaktualisasikan kembali Pancasila dan tiga pilar MPR lainnya dalam kegiatan mengajar dikelas seperti yang diungkapkan oleh Kepala Sub. Dukungan Pelaksanaan Sosialisasi, Bapak Endang Sapari bahwa :

> "Sangat perlu mengingat sekarang sudah tidak ada lagi BP-7 yang bertugas menggali materi hingga menyampaikannya ke masyarakat, sehingga banyak materi yang seharusnya sudah diperbaharui seperti amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang sudah kesekian kalinya, Tap MPR yang masih berlaku, pengejawantahan dari sila-sila Pancasila. karena banyaknya materi yang sesuai dengan background dan profesi PPKNan maka dari itu MPR menganggap guru, dosen bahkan mahasiswa PPKn perlu menerima sosialisasi Empat Pilar MPR. karena mampu mengaktualisasikan Pancasila dan tiga pilar lainnya kepada masyarakat".[53]

Tidaklah mudah mengaktualisasikan Pancasila bersamaan dengan tiga pilar MPR lainnya, membahas salah satu pilar dalam pembelajaran di kelas seperti

[53] Hasil Wawancara dengan *Key* Informan, Endang Sapari, S.IP. 28 Maret 2016 di Ruang Biro Persidangan dan Sosialisasi MPR RI.

Pancasila sudah sulit dengan waktu alokasi yang tidak sebentar hingga peserta didik paham. seperti yang diungkapkan oleh Ibu Eni Sanasih Rusman, bahwa :

> Yang diajarkan di kelas, adalah yang ada dalam kurikulum PPKn SMP yang diturunkan lewat Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar. seringkali materi-materi Pancasila, bentuk negara, Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia ada dalam KD dan Bagian yang berbeda-beda tidak seperti empat pilar yang seperti satu paket. Menurut saya lebih baik terpisah karena untuk memahami Pancasila misalkan murid membutuhkan waktu untuk mencerna materi, sulit mengajarkan ke empatnya dalam waktu yang bersamaan".[54]

Senada dengan Ibu Eni Sanasih Rusman, guru yang merasa keberatan untuk menyampaikan materi Pancasila apabila ditambahkan empat pilar dalam satu waktu seperti yang diungkapkan oleh Bapak Iwan Sajali, bahwa :

> "menyampaikan ke empat pilar dalam waktu bersamaan dalam proses belajar mengajar tentunya tidak tepat, materi Pancasila seperti sejarahnya saja memerlukan banyak estimasi waktu jam belajar hingga peserta didik paham".[55]

Respons dari pihak MGMP PPKn pun, seperti yang diungkapkan oleh Bapak Mohamad Sodeli, bahwa

> "Kalau kita di kelas mengajar berdasar kompetensi, kompetensi apa yang sesuai kurikulum. kita masukan Pancasila dalam empat pilar itu kita masukan dalam kompetensi. tetapi kalau kita ajarkan atau mengemasnya dalam satu kesatuan empat pilar juga sulit karena terbatas".[56]

4.3.9. Penemuan dan Penafsiran Pancasila dalam Sosialisasi Empat Pilar MPR RI

Pentingnya penemuan-penemuan baru terkait ideologi Pancasila dalam menafsirkan kehidupan bemasyarakat, berbangsa dan bernegara merupakan suatu

[54] Hasil Wawancara dengan Informan Eni Sanasih Rusman, S.Pd. 24 Maret 2016.
[55] Hasil Wawancara dengan Informan Iwan Sajali, S.Pd. 24 Maret 2016.
[56] Hasil Wawancara dengan Informan Mohamad Sodeli, M.Pd. 10 Maret 2016.

tuntutan kepada lembaga MPR selaku lembaga yang mendapatkan wewenang untuk memasyarakatkan Pancasila. Begitu pula dengan penafsiran-penafsiran tentang Pancasila yang diberikan dari institusi dan Anggota MPR perlu memiliki kesepakatan dan kerangka yang sama dengan tidak menghilangkan wibawa Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara.

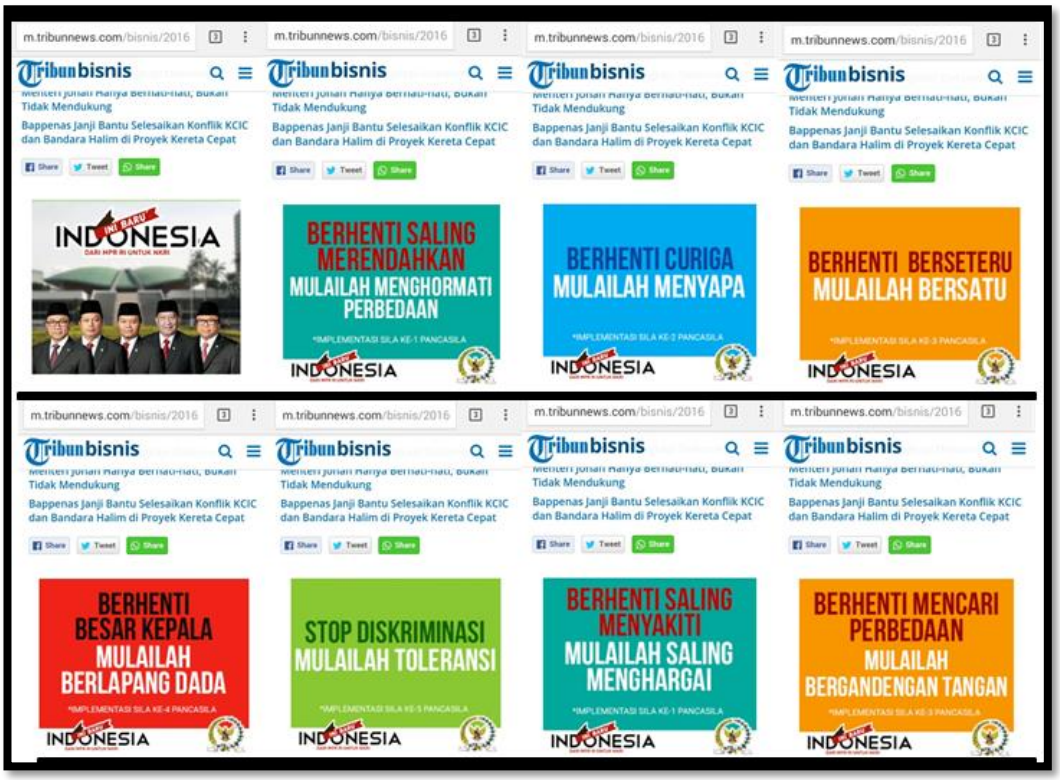

Gambar 8. Iklan Berjalan Gaya Hidup Pancasila oleh MPR RI di *tribunnews.com*

Saat ini MPR RI tengah fokus mengembangkan slogan-slogan yang dikemas dengan media iklan bergsambar penafsiran dengan gambar berjalan hal ini diungkapkan oleh Bapak Ahmad Basarah bahwa :

> "Sejak 1 juni 2014, kami fokus menafsirkan implementasi Pancasila melalui slogan-slogan atau ajakan hidup rukun, tidak diskriminatif, bermusyawarah dsb. yang disajikan melalui selebaran, spanduk utamanya melalui media-media online atau iklan gambar berjalan".[57]

[57] Hasil Wawancara dengan *Key Informan*, Drs. H. Ahmad Basarah, M.H. 27 April 2016.

Penggunaan media gambar berjalan yang menampilkan slogan Pancasila dianggap belum efektif dalam membangun pemahaman Pancasila di masyarakat berdasarkan Survei Badan Pusat Statistik yang berlangsung pada 27 – 29 Mei 2011. Dengan menggunakan metode wawancara langsung dengan 12.056 responden di 181 Kabupaten dan Kota pada 33 provinsi di seluruh Indonesia. Responden terdiri dari pelajar, guru, dosen, pengusaha dan sebagainya.[58] Menunjukan ada capaian presentase 19% bahwa Pancasila akan aktual dengan sendirinya apabila di contohkan melalui perilaku pejabat negara. Presentase tersebut jauh lebih besar dari sosialisasi atau penataran yang hanya akan menghasilkan capaian sekitar 13% saja.

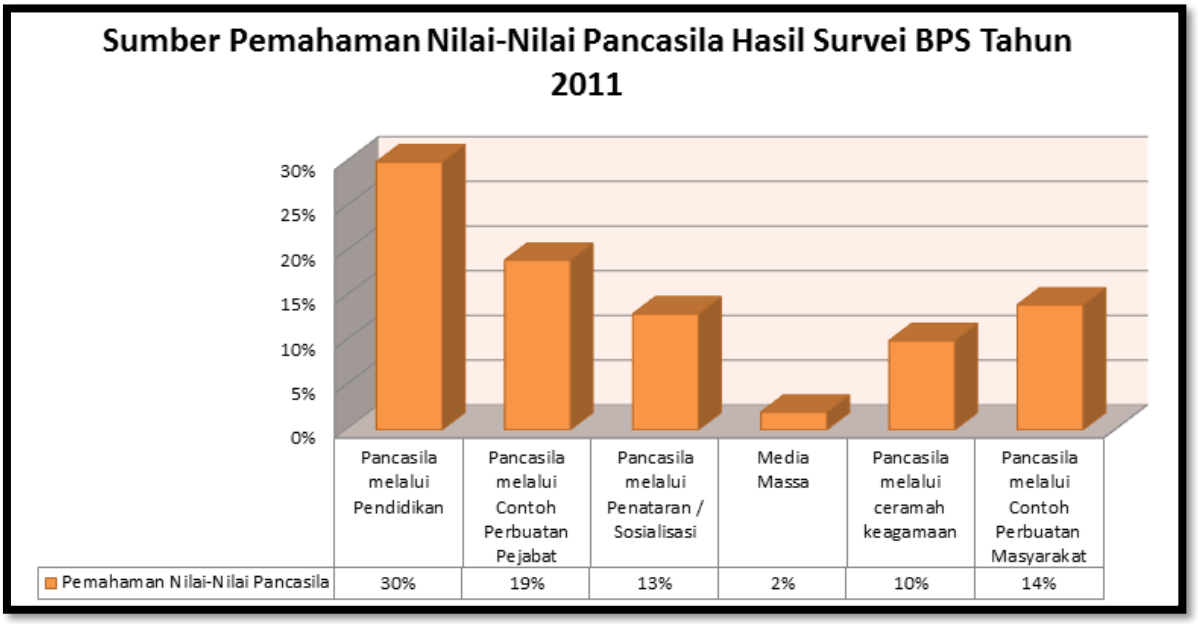

Grafik 5. Sumber Pemahaman Nilai Pancasila

[58] bps.go.id/08/097787/presiden-SBY-umumkan-survei-pancasila-mpr-2011/

Kesepahaman Pancasila akan lebih tepat apabila langsung dicontohkan oleh para Anggota MPR juga disampaikan oleh informan lainnya, Bapak Aditiya Fajarsyah beranggapan bahwa :

> "Akan lebih berdampak apabila masyarakat langsung diberikan contoh oleh para pejabat di MPR, Jikalau mau disosialisasikan materinya dibagian praktis-praktis saja, karena teorinya kan bisa di dapat di sekolah. Dibuktikan kalau tidak dicontohkan Pancasilais, siapa yang mau ikut nanti bertidak seperti Pancasilais, sekarang Bangsa mana yang mau memakai Pancasila, selain Indonesia, padahal nilai-nilai yang dikandungnya universal layak juga disejajarkan dengan ideologi besar lainnya".[59]

Gambar 9. Publikasi Pancasila oleh Ahmad Basarah di berbagai media *online.*

Anggota MPR RI memberikan tanggapan bahwa saat ini Anggota MPR RI telah membuat ramai pemebritaan tentang relevannya Pancasila dengan kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara apabila dikaitkan dengan masalah sosial saat ini, hal ini rutin

[59] Hasil Wawancara dengan Informan, Aditiya Fajarsyah, S.Pd. 10 Maret 2016 di Ruang Guru SMAN 21 Jakarta.

dilakukan jumpa media lokal ataupun media kerjasama MPR setelah pelaksanaan sosialisasi. seperti yang diungkapkan oleh Bapak Ahmad Basarah bahwa :

> "Pasti, karena sudah urgen mengaitkan Pancasila kita dengan masalah yang sedang dihadapi masayarakat dan negara, pada tahun 2015 lalu banyak artikel yang ditulis saya dan anggota MPR lainnya dalam kerangka sosialisasi terkait Pancasila yang diberitakan media lewat sosialisasi empat pilar MPR. Pancasila dikaitkan dengan masalah agama seperti Gafatar, atau dengan fenomena LGBT. saya seringkali diwawancarai wartawan atas kapasitas saya sebagai Ketua Badan Sosialisasi untuk menjelaskan prespektif Pancasila dalam menghadapi tantangan bangsa saat ini".[60]

4.4. Pembahasan

Dari data yang telah diperoleh selama melakukan penelitian, maka dapat dianalisis permasalahan yang dibahas pada penelitian ini yaitu bagaimana MPR RI mengaktualisasikan Pancasila melalui Sosialisasi Empat Pilar MPR. Analisis ini diperoleh dari hasil pengamatan langsung, hasil wawancara dengan informan yaitu para Akademisi PPKN dari belatar pendidikan khususnya keilmuan PPKN dan organisasi PPKN yang pernah mengikuti kegiatan Sosialisasi Empat Pilar MPR RI dan *key informan* terdiri dari Sekretariat MPR RI dan Badan Sosialisasi MPR RI.

Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, MPR RI merupakan lembaga legislatif bikameral, terdiri dari 10 fraksi DPR RI dan DPD. MPR RI mempunyai tugas dan wewenang dalam mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Melantik Presiden dan Wakil Presiden RI hasil pemilihan umum, Memutuskan usul DPR RI untuk memberhentikan Presiden

[60] Hasil Wawancara dengan *Key Informan,* Drs. H. Ahmad Basarah, M.H. 27 April 2016.

dan/Wakil dalam masa jabatannya, Melantik Wakil Presiden jadi Presiden, Memilih Wakil Presiden.

Aktualisasi, atas Pancasila mutlak dilakukan oleh semua komponen bangsa termasuk dukungan negara tak terkecuali negara harus memberikan tempat bagi munculnya beragam pemikiran reflektif dan kritis atas Pancasila. Sebagai sebuah ideologi terbuka, Pancasila pada dirinya terbuka untuk dimaknai sesuai perkembangan kebudayaan warga negara Indonesia. Berdasarkan Peraturan MPR RI nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib MPR RI, bahwa MPR telah merancang dan melaksanakan agenda pemantapan nilai-nilai dan norma kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara melalui sosialisasi Empat Pilar MPR-RI untuk memasyarakatkan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai konstitusi negara serta Ketetapan MPR, Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai bentuk negara, dan *Bhinneka Tunggal Ika* sebagai semboyan negara.[61]

MPR RI mendapatkan tugas dan wewenang tambahan untuk memasyarakatkan nilai-nilai kebangsaan termasuk Pancasila. dalam penafsiran memasyarakatkan menurut MPR RI adalah membuat suatu Badan Sosialisasi beserta kegiatan sosialisasi yang melibatkan anggota MPR dengan masyarakat yang menjadi sasaran sosialisasi Empat Pilar MPR RI. Seharusnya pengertian memasyarakatkan tidak hanya dengan membentuk suatu Badan sosialisasi dan melaksanakan kegiatan sosialisasi, melainkan MPR melalui 692 anggotanya memberikan contoh yang aplikatif kepada masyarakat dan menjadi *role model*

[61] Pimpinan MPR dan Tim Kerja Sosialisasi MPR RI Periode 2009-20014, *Loc.Cit,* hlm xxii.

implementasi Pancasila yang sesungguhnya lewat tindakan nyata yang ditunjukan kepada publik, untuk memenuhi unsur memasyarakatkan Pancasila Anggota MPR wajib memasyarakatkan Pancasila dengan mencontohkan melalui kinerjanya di bidang legislasi. Hal ini diperkuat oleh, Prof. Udin S. Winataputra, M.A. bahwa :

> "Mensosialisasikan Pancasila itu pengetahuannya harus cukup, kemudian sikapnya jadi Anggota MPR harus punya sikap sebagai pengusung nilai-nilai Pancasila, begitu juga dalam perilakunya Pancasila harus ditunjukan oleh Anggota MPR dengan begitu maka publik akan menangkap figurnya layaknya *role model* jadi Pancasila itu harus ditunjukan dari perilakunya. Apakah Anggota MPR itu sudah menjadi *role model* atau hanya *lips service* saja. Nah itu bisa ditelusuri dengan melihat kerjanya melalui sidang-sidang, *Voting,* terkahir DPD itu ricuh antara anggota denga Ketua DPDnya. pertanyaan publik adalah *is it the value of* Pancasila? apakah itu cerminan nilai-nilai Pancasila karena itu *role model* bukan hanya sebatas di ruang sidang. kalau belum kenapa ataukah karena *leg of knowledge* atau kurang pengetahuan orang MPR perlu menelusuri Pidato 29 Mei -1 Juni 1945. dan musti memahami perbedaan pandangan Soepomo, Sukarno lalu pandangan Muhammad Yamin itu jadi akhirnya buku sejarah tatanegara harus dikuasai kalau mereka masih bingung sendiri tidak bisa jadi *role model* bagi publik".[62]

Iklan Berjalan Gaya Hidup Pancasila

[62] Hasil Wawancara dengan *Expert,* Prof. Dr. Udin S. Winataputra, M.A. 9 Mei 2016 di Ruang Seniorat FKIP-UT Jakarta.

Dengan bertambahnya tugas dan wewenang MPR, berdampak kepada Anggota MPR, Anggota MPR mendapatkan tugas tambahan sebagai Sosialisator Empat Pilar MPR RI, disamping tugas dan wewenang legislatif yang telah lama melekat. Dengan tugas tambahan inilah Anggota MPR mendapatkan tugas tambahan berupa melaksanakan kegiatan Sosialisasi yang harus menyeluruh hingga ke pelosok tanpa meninggalkan kewajibannya sebagai anggota legislatif DPR dan DPD. Anggota MPR mendapat tugas memahami apa yang disosialisasikannya. Masyarakat menyoroti praktik-praktik keseharian bernegara melalui cara pandang atas penerapan Pancasila sebagai etika politik. Cara pandang tersebut adalah salah satu bentuk menjadikan Pancasila tetap hidup dalam kenyataan sehari hari.

Lemahnya *Personal Branding* Anggota MPR RI memberikan keraguan akan kompetensi dan kualifikasi yang dimiliki anggota MPR dalam mensosialisasikan pilar-pilar kebangsaan khususnya Pancasila, sebab Pancasila bukanlah pengetahuan umum yang langsung dimiliki oleh Anggota MPR RI. dengan adanya periode legislatif 2014-2019, Dengan banyaknya anggota legislatif DPR yang baru, mencapai 57% dan dengan masuknya Partai Baru seperti Nasional Demokrat dalam lembaga DPR, MPR RI belum menunjukan keseriusan dalam tahap awal, pra pelaksanaan sosialisasi dengan hanya melaksanakan orientasi berupa sosialisasi Empat Pilar MPR, tanpa melaksanakan pembinaan, pendampingan, pengajaran materi begitu pula tanpa refleksi atas kinerja legislasi yang menjauh dari Pancasila. Pancasila bukanlah pengetahuan umum yang ilmunya dapat diperoleh Anggota MPR tanpa melalui proses penyadaran dan belajar, dengan hanya melaksanakan satu kali kegiatan orientasi tidaklah cukup bagi MPR untuk mensosialisasikan nilai-nilai luhur seperti Pancasila, ketidak layakan Anggota MPR

ini juga diperkuat oleh *Expert Opinion*, Prof. Udin S. Winataputra, M.A. yang mengatakan bahwa :

> "Apabila MPR baru satu kali melaksanakan orientasi awal bagi Anggota MPR pada periode 2014-2019, belum cukup itu baru kulitnya saja. jadi bisa dibayangkan kalau Anggota MPR nya itu baru diberikan kulitnya saja seperti itu, bagaimana dia bisa menyampaikan, kan yang disampaikannya bukan pengetahuan umum, apalagi menyampaikan semangat nasionalisnya jadi *they have to show of they are* jadi publik itu bisa menilai oh ini ya Anggota MPR, selain dia *well inform* dia punya tampilan yang menarik bagaimana bisa publik meyakini kalau orang MPR tidak yakin dengan yang disampaikannya, Apabila publik bertanya mana yang lebih baik apakah komunisme, liberalisme, Pancasila ataukah islamisme, Anggota MPR harus punya *collective decision* bahwa Pancasila itu pilihan terbaik bagi Indonesia. sebab apabila Indonesia memilih Islamisme sebagai dasar negara non Islam akan melarikan diri, apabila liberalisme justru akan terabaikan terlepas dari realitas sekarang. Apabila hanya ada satu kali kegiatan orientasi itu hanya seperti main-main kalau seperti itu Pancasila dikalangan Anggota MPR baru sekedar formalisme, belum subtantif apalagi praksis operasional. Subtantif itu adalah sudah jadi dirinya sebagai negarawan dan negarawan itu bukan jubir partai politik, bukan juga jubir pemerintah tetapi jubir dari negara."[63]

Pancasila memiliki banyak Dimensi, tidak hanya sebagai dasar dan ideologi negara seperti yang diangkat oleh MPR RI, melainkan dimensi praksisnya yakni paradigma pembagunan, kontrol masyarakat, sumber dari segala sumber hukum, Pancasila mengcover berbagai dimensi politik, sosial, budaya, agama, ekonomi. Sehingga Pancasila tidak bisa hanya digali melalui satu aspek dimensi. Pancasila adalah ideologi menurut teori, Earl Johnson ideologi semestinya di internalisasi melalui indoktrinasi, Hal ini dijelaskan oleh Prof. Udin S. Winataputra, M.A. yang mengatakan bahwa :

> "Kemudian tentang indoktrinasi itu tidak ada yang salah karena ada dua jenis indoktrinasi yang pertama itu adalah *avoidable* dan *unavoidable* dari teori Earl Johnson bahwa indoktrinisasi itu ada dua, yang pertama adalah

[63] Hasil Wawancara dengan *Expert*, Prof. Dr. Udin S. Winataputra, M.A. 9 Mei 2016 di Ruang Seniorat FKIP-UT Jakarta.

avoidable yang berarti indoktrinasi yang bisa dihindari dan *unavoidable* yang berarti indoktrinasi yang tidak bisa dihindari di dalam agama dan ideologi banyak yang tidak bisa dihindari sebagai contoh bahwa tuhan itu esa, tidak bisa dihindari. Bahwa Indonesia memilih Pancasila sebagai titik tengah, nah nilai-nilai yang tidak bisa dihindari itu adalah yang ideal dan disepakati oleh bangsa-bangsa. Jadi Amerika itu sejak berdiri menyepakati liberalisme, Turki itu menyepakati sosialisme sekuler di dalam konstitusi Turki itu jelas, adalah negara sosialis sekuler makanya di Turki itu di kampus tidak ada masjid atau musholla, karena negara tidak mengurusi itu. Jadi untuk nilai-nilai yang sdah disepakati boleh di indoktrinasikan termasuk Pancasila, tetapi cara mengindoktrinasikannya bisa melakukan *full indoctrinitation* seperti khutbah jum'at dan *inquiry oriented indoctrinitation* kan MPR itukan inginnya masyarakat mengerti bahwa Pancasila itu terbaik, tapi jangan dipaksakan dengan ceramah berikan persoalan andai kata bisa memilih komunis, islamisme, liberalis dan Pancasila berikan pertimbangan-pertimbangannya. andai kita pilih islam, yang non islam akan pergi, kalau liberalis orang bisa saling menjegal untuk mencapai apa yang diinginkannya, kalau komunisme orang boleh berkerja sekuat tenaga tetapi makan asal cukup. slogan komunis kan seperti itu. makanya segala macam diawasi oleh negara karena negara adalahyang paling utama terus Pancasila jadi biarkanlah peserta Empat Pilar mengambil kesimpulan bahwa yang dari empat itu kalau Pancasila dibandingkan dengan Islamisme, liberalisme dan komnisme biarkan peserta mengambil kesimpulan bagi Indonesia itu apa yang paling tepat itu namanya *inquiry oriented indoctrinitation* peserta menemukan sendiri tidak langsung. Sejauhmanakah Pancasila dapat diaplikasikan dalam bentuk norma-norma yang jelas dalam kaitannya dengan tingkah laku warga negara dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara."[64]

[64] Hasil Wawancara dengan *Expert*, Prof. Dr. Udin S. Winataputra, M.A. 9 Mei 2016 di Ruang Seniorat FKIP-UT Jakarta.

Materi Pancasila yang diberikan pada saat sosialisasi perlu disesuaikan dengan peserta kegiatan sosialisasi Empat Pilar MPR, saat ini sosialisasi Pancasila masih bertumpu pada satu sumber materi utamanya buku Empat Pilar MPR RI, hingga Panduan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Penting untuk adanya jenjang penyampaian Pancasila, umumnya materi antara siswa SMA berbeda dengan Mahasiswa, begitu juga untuk Guru dan Dosen dan sangat berbeda seharusnya untuk praktsi pemerintahan dan birokrasi. menurut teori yang dikemukakan Edwin Vanton, materi perlu disesuaikan sesuai tingkatan pendidikan, tidak bisa diseragamkan dan disamaratakan.

Metode-metode sosialisasi yang beragam, Dalam kerangka kegiatan sosialisasi empat pilar MPR RI, untuk memberikan pembelajaran dan pendidikan politik, diselenggarakan juga pelatihan untuk Pelatih Sosialisasi Putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau yang disebut dengan *Training of Trainers* (TOT) di tingkat Provinsi dan beberapa lembaga Pendidikan, Kementerian dan Pemerintahan. Menyelenggarakan kegiatan Cerdas Cermat Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Ketetapan MPR tingkat sekolah menengah atas. MPR RI juga menyelenggarakan seminar-seminar di masyarakat dan kampus-kampus dengan mengangkat materi Empat Pilar MPR RI. Sebagai bahan perbandingan pelaksanaan sosialisasi yang dilakukan MPR dengan BP-7 Pusat diuraikan sebagai berikut :[65]

[65] Hasil Wawancara dengan *Expert,* Prof. Dr. Udin S. Winataputra, M.A. 9 Mei 2016 di Ruang Seniorat FKIP-UT Jakarta.

Tabel 3. Perbandingan Kegiatan Memasyarakatkan Pancasila

Training of Trainers **MPR RI**	**Penataran Manggala** **BP-7 Pusat**
Tujuan "Peserta diharapkan untuk menjadi trainer dan fasilitator yang handal sehingga mampu mengontribusikan mensosialisasikan Empat Pilar MPR di masyarakat".	Tujuan "Menjadi Juru Bicara Negara" Manggala mampu menganalisis dan merancang kebutuhan pelatihan, memahami prinsip, metode dan model P-4. Memiliki gaya mengajar serta memahami dimensi-dimensi Pancasila dan etatanegaraan
Sasaran Guru dan Dosen	Sasaran 1. Akademisi, umumnya Dosen Perguruan Tinggi (Lektor) 2. Setiap level Pimpinan yang memiliki tanggung jawab memberdayakan bawahannya.
Bentuk Kegiatan • Umumnya 4 hari • Penyampaian materi Pancasila • Membedah UUD NRI Tahun 1945 • Diskusi dan simulasi kelompok	Bentuk Kegiatan • Berdurasi 100 Jam • Kegiatan kelompok • Ceramah umum Pancasila
Sumber Materi 1. Buku Empat Pilar MPR RI 2. Undang-Undang Dasar NRI 1945 3. Ketetapan-Ketetapan MPR 4. Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar NRI 1945 dan Ketetapan MPR RI	Sumber Materi 1. Materi Penyegaran Penatar Buku I - Pancasila 2. Materi Penyegaran Penatar Buku II - Undang-Undang Dasar NRI 1945 3. Materi Penyegaran Penatar Buku III - Garis Besar Haluan Negara 4. Buku (Kunyit) – Pelengkap 5. Buku Merah Putih 6. Ketetapan MPR

Output • Tidak ada kewajiban mensosialisasikan kembali Empat Pilar MPR • Belum ada pembaharuan materi Empat Pilar MPR RI yang subtansial.	Output • Diangkat sumpah Manggala • Bertanggung jawab untuk ikut serta melaksanakan P4 • Diperbaharuinya materi buku, yang bahan-bahannya didapat melalui ceramah narasumber, sebagai contoh Penataran Calon Manggala angkatan VI- di Bogor bulan November 1986 menghasilkan pengembangan Buku I, II dan III yang terbit di tahun 1987.
Sumber : Laporan Tahunan Badan Sosialisasi MPR RI T.A. 2015	Sumber : • Hasil Wawancara dari Expert Prof. Udin S. Winataputra, M.A. • Materi Penyegaran Penatar Buku II Bidang UUD NRI 1945.

Menurut Prof. Udin S. Winataputra, M.A. mengatakan bahwa penataran yang dilaksanakan oleh BP-7 berbeda dengan sosialisasi MPR RI dalam mengaktualisasikan Pancasila, bahwa :

> "Kalau MPR merasa BP-7 itu adalah doktrinisasi mungkin MPR tidak pernah ikut BP-7, pada awal tahun 70an saya ikut penataran P-4 100 jam para dosen di Bandung itupun pada awalnya tidak ada kesan indoktrinisasi karena banyak kerja kelompok dan sebagainya, pada ceramah umumnya iya, seperti indoktrinisasi. Indoktrinasi karena yang disampaikan adalah ideologi Pancasila, berhubungan dengan *inquirinya* kita buka buku-buku kenegaaraan, buka Undang-Undang Dasar, kita buka Tap MPR kita diskusikan. jadi sebenarnya di dalamP-4 itu sangat bagus karena sudah melibatkan banyak hal apalagi yang diujung Orde Baru masih ada penataran P-4 terakhir itu adalah para Dosen lektor pangkat keatas, mengadakan penataran di Pelabuhan Ratu sudah demokratis penatarannya.[66]

[66] Hasil Wawancara dengan *Expert*, Prof. Dr. Udin S. Winataputra, M.A. 9 Mei 2016 di Ruang Seniorat FKIP-UT Jakarta.

Media sosialisasi untuk mengaktualisasikan Pancasila yang digunakan MPR RI, saat ini sudah sangat beragam mendukung dari banyaknya metode yang dikembangkan MPR. jadi media tidak hanya terbatas melalui bahan tayang yang berisikan media power point serta buku-buku penunjang sosialisasi seperti, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. banyak media lainnya yang sudah digunakan MPR sebagai media sosialisasi seperti, website resmi empatpilar.org dan mpr.go.id sebagai media publikasi resmi. melalui media cetak majalh resmi yang terbit tiap 1 bulan sekali, Majelis. kemudian melalui banyak media elektronik rumah kebangsaan di TVRI, Metro TV dan TV One, Dialog Kebangsaan melalui Radio Republik Indonesia.[67]

Tabel 4. Tahapan Aktualisasi Pancasila melalui Empat Pilar MPR RI

Penerimaan	• Peserta sosialisasi sudah memiliki pemahaman Pancasila. • Akademisi menerima urgensitas MPR mensosialisasikan Pancasila.	Tidak adanya penolakan subtantif Pancasila
Merespons	• Menerima: Kajian Pancasila melalui diskusi • Menolak : *Pancasila disejajarkan dengan Pilar*	Interpretasi Pancasila melalui Empat Pilar MPR RI
Seleksi	• Akademisi sudah memahami Pancasila • Implementasi melalui praktik dan contoh kegiatan legislasi MPR RI	Aktualisator runtut menjelaskan sesuai PPT
Internalisasi	• Konsep Empat Pilar tidak diajarkan kembali di KBM. • Konsep Pancasila dalam Empat Pilar MPR tidak dikategorikan *invetion.* • Indoktrinisasi memudahkan penyampaian Pancasila.	Tidak adanya penegasan dan penguatan materi Pancasila
Aktualisasi	• Penemuan Aplikatif Pancasila berupa upaya politis MPR melaksanakan Pancasila	MPR membangun upaya bersama mengaktualisasi Pancasila

[67] Lembar Observasi.

Internalisasi Pancasila harus menyeluruh, sesuai dengan ikatan anggota MPR dengan dapil sehingga merata sampai ke pelosok, guna meminimalisir ideologi asing, terorisme dan separatisme yang massif di daerah. dalam teknisnya perlu sekali adanya pembaharuan dan penyegaran materi agar tidak berulang kepada sasaran yang sama dengan materi yang sama pula proses ini sangatlah penting dalam proses merespon aktualisasi Pancasila sebagai pilar MPR. Perlu juga ada teguran apabila ada anggota MPR yang korupsi atau tidak layak karena seringkali menggunakan forum empat pilar MPR RI sebagai sarana kampanye gratisan. untuk anggaran penyelenggaraan ada baiknya ada transparansi kepada publik untuk meningkatkan kepercayaan dan akuntabilitas sehingga implementasi Pancasila tercermin dari lembaga MPR, DPR dan DPD. Transparansi penting bukan hanya untuk kepercayaan atas apa yang dilakukan MPR RI melainkan untuk legitimasi atas Pancasila yang diaktualisasikan MPR dan juga menghilangkan kesan bahwa Empat Pilar adalah monopoli MPR.

Selain itu perlu adanya upaya bersama dalam proses internalisasi Pancasila sebagai pilar MPR. Menanamkan karakter Pancasila dari jenjang terdasar pendidikan hingga ke level pemerintahan, seperti yang diungkapkan oleh *expert* Prof. Udin S. Winataputra, M.A. bahwa :

> “Harus ada lembaga yang berfungsi meningkatkan kecerdasan warga negara, apakah kedepannya lembaga itu tunggal atau kolaborasi antar lembaga, itu tergantung pemerintah. sekarang ini kan berlaku istilahnya merampingkan struktur dan memperkaya fungsi. Sekarang kalau membentuk lembaga baru sandungannya banyak, APBN terbatas baiknya untuk mengejar pembangunan, Infrastruktur. Saat ini banyak lembaga-lembaga yang mempunyai fungsi mencerdaskan warga negara, MPR punya fungsi itu, Ditjen Pothan punya fungsi itu, Lemhannas, Institusi Pendidikan, Perguran Tinggi, Polri, Dirjen Pajak, BNN, KPK, KWARNAS Pramuka hingga Maj’lis Talim, lembaga agama pun ada justru dalam Reformasi ini perlu duduk bersama yang merasa punya fungsi mencerdaskan bangsa buatlah kerangka

pemikiran bersama, bentuk kordinasi menentukan sasaran dan materi dengan standar yang sama, sebagai contoh beberapa lembaga saat ini punya program Bela Negara, MPR melaksanakan bela negara untuk tujuan memasyarakatkan nilai kebangsaan, Pancasila. Dirjen Pajak, punya juga program bela negara untuk mengajarkan orang tertib bayar pajak. Pertanian juga punya program serupa untuk memproduksi varietas unggul untuk mengharumkan nama bangsa, jadi seluruh kementerian, MPR semuanya punya fungsi itu, yang belum ada adalah pemahaman bersama dan komitmen bersama. Saat ini seringkali lembaga-lembaga tumpeng tindih dan konflik satu sama lain *over lapping.''*[68]

Tabel 5. Capaian Aktualisasi Pancasila yang dilakukan oleh MPR RI

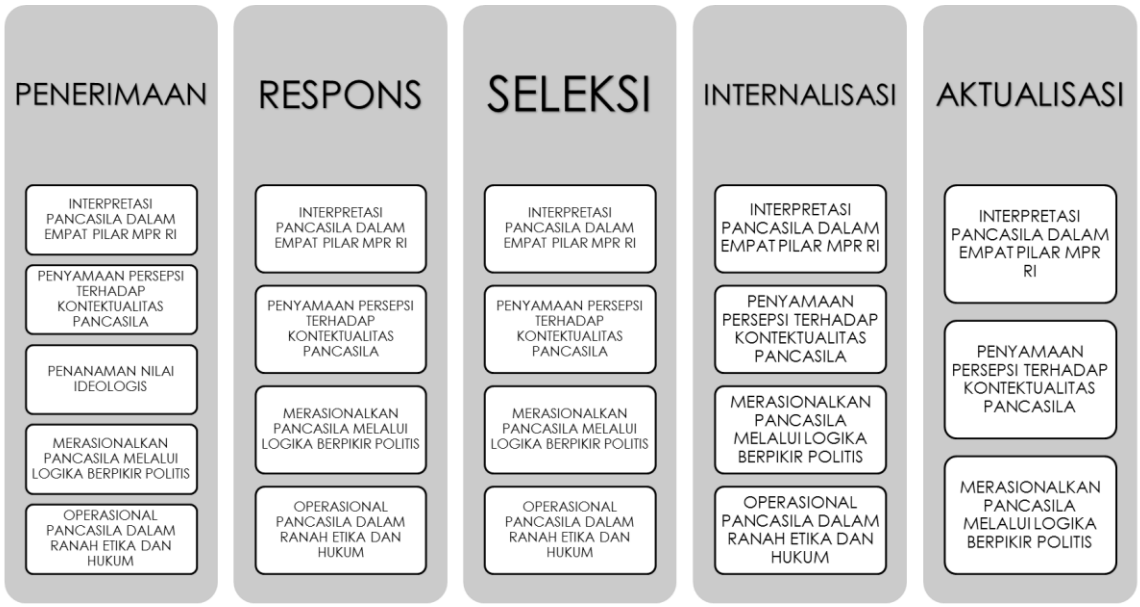

[68] Hasil Wawancara dengan *Expert*, Prof. Dr. Udin S. Winataputra, M.A. 9 Mei 2016 di Ruang Seniorat FKIP-UT Jakarta.

4.5. Keterbatasan Metodologis

Penelitian ini telah dilakukan sesuai dengan susunan prosedur penelitian kualitatif. Peneliti menyadari bahwa dalam penelitian ini masih terdapat beberapa keterbatasan. Namun, penelitian ini telah dilakukan semaksimal mungkin. *Pertama*, Majelis Permusyawaratan adalah Lembaga Tinggi Negara, Dalam hal ini adalah akses peneliti yang terbatas karena MPR adalah lembaga dengan *Maximum Security* dengan birokrasi yang panjang. Untuk menunggu konfirmasi ijin penelitian peneliti memerlukan waktu satu minggu setelah proses pengajuan.

Dalam masa observasi juga peneliti seringkali menemui kesulitan karena tidak semua data dibuka untuk umum dan dapat di akses oleh peneliti. Kedua peneliti harus mencari informan yang berlatar belakang pendidikan PPKN dan Organisasi PPKN, dengan letak informan yang tidak dalam satu tempat yang sama, seringkali membuat peneliti kesulitan mewawancarai informan. ketiga *Key* Informan dalam penelitian ini adalah pemangku jabatan dan mandat dari MPR RI, baik dalam Badan Sosialisasi MPR RI juga Sekretariat Jenderal MPR RI sehingga peneliti membutuhkan urus perizinan dan waktu serta kepercayaan dari pihak MPR RI.

Ranah metodologis Peneliti belum bisa mengukur tingkat aktualisasi Pancasila dalam persepsi Akademisi maupun ketercapaian dari sosialisasi dikarenakan belum banyak ahli yang memfokuskan riset pada aktualisasi Pancasila. Terkait ketiidaksempurnaan penelitian ini, Peneliti menyadari bahwa tidak menutup kemungkinan diadakan penelitian lebih lanjut.